



PPAS
20
25

RANCANGAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2025



Pemerintah Kabupaten Belitong Timur

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 142 TAHUN 2025
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama : KAMARUDIN MUTEN
Jabatan : Bupati Belitung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- b. Nama : AGUS FIRMANSYAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- c. Nama : DWI NANDA PUTRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan umum APBD TA. 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2025, Perubahan prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Manggar, Tanggal 28 Juli 2025

PIHAK KESATU
BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN

PIHAK KEDUA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,

FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.

WAKIL KETUA,

AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA,

DWI NANDA PUTRA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS.....1

1. 2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....3

1. 3. Dasar Penyusunan Perubahan PPAS.....3

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....7

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....18

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN131

4. 2.1 Program-program Prioritas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar131

4. 2.2 Program-program Prioritas pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar137

4. 2.3 Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Pilihan.....147

4. 2.4 Program-program Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....150

4. 2.5 Program-program Prioritas pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan151

4. 2.6 Program-program Prioritas pada Unsur Kewilayahan - Kecamatan.....152

4. 2.7 Program-program Prioritas pada Unsur Pemerintahan Umum.....154

4. 2.8 Program-program Prioritas pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....155

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....226

BAB VI PENUTUP.....228

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ringkasan Akun Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.....2

Tabel 2.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024.....8

Tabel 2.2 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 -2024..... 10

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 – 2024.....10

Tabel 2.4 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....12

Tabel 3.1 Alokasi Pagu Belanja Wajib.....19

Tabel 3.2 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....20

Tabel 3.3 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional22

Tabel 3.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi...53

Tabel 3.5 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....95

Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....157

Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024227

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penyusunan kebijakan anggaran menjadi instrumen utama untuk mendukung capaian program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam rangka menjaga kualitas dan konsistensi pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dokumen PPAS tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun demikian, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan sering kali terdapat dinamika yang memerlukan penyesuaian, baik karena perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan nasional, maupun perkembangan kebutuhan riil di daerah. Oleh karena itu, dilakukan proses penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk respons terhadap dinamika tersebut.

Penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan tindak lanjut atas berbagai perkembangan, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap kebijakan anggaran daerah. Salah satu dasar hukum penting dalam proses perubahan ini adalah **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025**, yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Instruksi Presiden tersebut menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja, prioritas program, serta proyeksi penerimaan daerah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini lahir sebagai respons terhadap tantangan fiskal nasional, khususnya dalam rangka mengendalikan defisit dan meningkatkan produktivitas belanja pemerintah. Pemerintah pusat mendorong agar seluruh pemerintah daerah turut melakukan langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi terhadap program atau kegiatan yang kurang mendukung pencapaian target pembangunan prioritas. Dengan demikian, perubahan kebijakan anggaran daerah diharapkan dapat lebih adaptif dan relevan terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan dan kondisi keuangan daerah.

Selain itu, penyusunan Perubahan PPAS perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 juga didasarkan pada perkembangan realisasi pendapatan daerah. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa asumsi pendapatan yang perlu disesuaikan berdasarkan evaluasi kinerja semester pertama. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pusat, serta pendapatan lain-lain yang sah menjadi dasar pertimbangan utama dalam melakukan perubahan

kebijakan anggaran. Hal ini penting agar alokasi belanja dapat lebih realistis, efektif, dan tepat sasaran sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Di sisi lain, terdapat pula perkembangan kebutuhan belanja yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti belanja penanganan dampak inflasi, penanggulangan bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya yang bersifat prioritas. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, maupun sub-kegiatan agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas anggaran.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas daerah dan capaian indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya perubahan prioritas dan plafon anggaran, diharapkan program-program prioritas daerah yang belum optimal dapat ditingkatkan pelaksanaannya, sedangkan program yang kurang relevan atau belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan rasionalisasi atau pergeseran alokasi anggarannya.

Lebih lanjut, perubahan kebijakan anggaran juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Salah satunya terkait dengan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dirancang agar selaras dengan kebijakan pusat, namun tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta kebutuhan daerah.

Secara garis besar, latar belakang penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat perkembangan asumsi pendapatan yang memerlukan penyesuaian agar proyeksi pendapatan lebih realistis sesuai dengan potensi riil yang dimiliki daerah.

2. Kebijakan Nasional terkait Efisiensi Belanja Pemerintah

Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan belanja agar lebih efisien, selektif, dan akuntabel, terutama untuk mendukung program prioritas nasional.

3. Perkembangan Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Perubahan kebutuhan belanja yang bersifat mendesak atau strategis menuntut adanya fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran agar program pembangunan daerah dapat berjalan optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penyesuaian terhadap Target Kinerja Daerah

Untuk memastikan pencapaian sasaran RPJMD dan perubahan RKPD Tahun 2025, maka dilakukan penyesuaian terhadap prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap capaian indikator kinerja pembangunan.

5. Dukungan terhadap Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat

Sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perubahan anggaran juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan strategis nasional, seperti pengendalian



inflasi, percepatan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Penyusunan perubahan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

APBD Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, selama tahun anggaran 2025, khususnya Semester I berjalan terjadi perubahan-perubahan terhadap realisasi dari asumsi yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menampung perubahan-perubahan tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
RINGKASAN AKUN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	819.083.075.067	793.908.493.067	- 25.174.582.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.333.314.067	127.333.314.067	-
4.1.01	Pajak Daerah	65.042.000.000	65.042.000.000	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	370.000.000	370.000.000	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000	70.000.000	-
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000	125.000.000	-
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.800.000.000	25.800.000.000	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.550.000.000	4.550.000.000	-
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.950.000.000	3.950.000.000	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.495.000.000	13.495.000.000	-
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.936.000.000	10.936.000.000	-
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.746.000.000	5.746.000.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	7.914.161.192	7.471.456.692	- 442.704.500
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.132.401.280	4.689.696.780	- 442.704.500
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.457.630.500	2.457.630.500	-
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	324.129.412	324.129.412	-



KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522	5.523.052.522	-
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.523.052.522	5.523.052.522	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.854.100.353	49.296.804.853	442.704.500
4.1.04.05	Jasa Giro	2.250.000.000	2.250.000.000	-
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000	15.000.000	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.567.481.190	3.567.481.190	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000	100.000.000	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000	500.000.000	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.995.000	20.995.000	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	56.600.000	18.100.000	- 38.500.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	784.824.050	784.824.050	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41.559.200.113	42.040.404.613	481.204.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	690.500.011.000	665.325.429.000	- 25.174.582.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.750.011.000	631.575.429.000	- 25.174.582.000
4.2.01.05	Dana Desa	39.418.079.000	39.418.079.000	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.362.621.000	14.324.031.000	- 38.590.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.758.856.000	42.758.856.000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.379.546.000	438.079.394.000	- 25.300.152.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.830.909.000	96.995.069.000	164.160.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.750.000.000	33.750.000.000	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.750.000.000	33.750.000.000	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	1.249.750.000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000	249.750.000	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	249.750.000	249.750.000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5	BELANJA DAERAH	971.908.229.501	847.457.876.936	-124.450.352.565
5.1	BELANJA OPERASI	782.083.707.645	701.196.584.774	- 80.887.122.871
5.1.01	Belanja Pegawai	485.381.515.450	470.427.121.404	- 14.954.394.046
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	272.927.446.544	259.155.823.342	- 13.771.623.202
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	181.043.856.251	179.986.757.907	- 1.057.098.344
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.079.487.000	12.959.287.000	- 120.200.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	582.956.500	577.484.000	- 5.472.500



KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000	621.600.000	-
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	17.126.169.155	17.126.169.155	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.818.611.392	217.813.294.567	- 66.005.316.825
5.1.02.01	Belanja Barang	62.361.540.870	39.819.252.245	- 22.542.288.625
5.1.02.02	Belanja Jasa	104.367.330.474	94.675.198.074	- 9.692.132.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.183.713.800	12.070.868.200	- 8.112.845.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.673.445.600	22.024.005.400	- 23.649.440.200
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.224.940.000	3.092.730.000	- 2.132.210.000
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.134.264.500	16.134.264.500	-
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.498.308.810	4.621.908.810	123.600.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.375.067.338	25.375.067.338	-
5.1.05	Belanja Hibah	9.793.580.803	9.986.168.803	192.588.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	572.384.803	933.572.803	361.188.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.264.381.000	6.095.781.000	- 168.600.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	20.000.000	20.000.000	-
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.135.665.000	1.135.665.000	-
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.801.150.000	1.801.150.000	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000	2.970.000.000	- 120.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.090.000.000	2.970.000.000	- 120.000.000
5.2	BELANJA MODAL	91.967.185.906	50.933.971.412	- 41.033.214.494
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.635.151.436	11.581.661.936	- 9.053.489.500
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	234.863.900	117.097.500	- 117.766.400
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.869.576.400	847.561.500	- 2.022.014.900
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	660.499.400	3.335.800	- 657.163.600
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	9.110.100	8.099.900	- 1.010.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.527.890.936	1.119.734.336	- 2.408.156.600
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	425.925.600	42.684.300	- 383.241.300
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	972.199.500	426.757.500	- 545.442.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.114.581.200	939.725.000	- 174.856.200
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.792.932.500	2.194.267.900	- 2.598.664.600
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	64.000.000	64.000.000	-
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	109.846.900	31.740.900	- 78.106.000



KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	585.905.800	352.628.200	- 233.277.600
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	250.048.000	324.498.300	74.450.300
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.070.506.300	3.162.265.900	91.759.600
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.947.264.900	1.947.264.900	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.342.452.006	21.098.046.306	- 3.244.405.700
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.216.292.006	20.053.370.306	- 3.162.921.700
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	326.160.000	244.676.000	- 81.484.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	800.000.000	800.000.000	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.402.047.864	16.744.703.570	- 28.657.344.294
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	20.954.954.076	5.348.308.400	- 15.606.645.676
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.892.666.500	2.892.666.500	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.683.857.100	3.292.713.100	- 391.144.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	175.000.000	175.000.000	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.487.534.600	1.409.559.600	- 77.975.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	77.975.000	-	- 77.975.000
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.409.559.600	1.409.559.600	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	100.000.000	-
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	100.000.000	100.000.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	96.857.335.950	94.327.320.750	- 2.530.015.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.825.416.750	6.825.416.750	-
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.333.157.052	6.333.157.052	-
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	492.259.698	492.259.698	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	90.031.919.200	87.501.904.000	- 2.530.015.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	90.031.919.200	87.501.904.000	- 2.530.015.200
	Total Surplus/(Defisit)	-152.825.154.434	- 53.549.383.869	99.275.770.565
6	PEMBIAYAAN DAERAH	152.825.154.434	53.549.383.869	- 99.275.770.565
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.825.154.434	53.549.383.869	- 99.275.770.565
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	152.325.154.434	53.412.484.057	- 98.912.670.377
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	5.582.478.646	4.180.116.613	- 1.402.362.033
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	16.140.138.436	-	- 16.140.138.436
6.1.01.05	Penghematan Belanja	119.211.134.035	44.615.838.728	- 74.595.295.307
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	11.391.403.317	4.616.528.716	- 6.774.874.601



KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	136.899.812	- 363.100.188
6.1.05.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000	136.899.812	- 363.100.188
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	152.825.154.434	53.549.383.869	- 99.275.770.565
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

1.1. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

- Menyesuaikan Proyeksi Pendapatan Daerah.
Untuk memastikan bahwa target pendapatan daerah yang direncanakan lebih realistis dan dapat dicapai sesuai perkembangan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Mengakomodasi Perkembangan Kebutuhan Daerah.
Mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mendesak dan prioritas baru yang muncul selama pelaksanaan APBD, termasuk kebutuhan belanja tidak terduga, penanganan inflasi, serta program prioritas lainnya.
- Mendukung Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menyesuaikan alokasi anggaran belanja daerah agar lebih efisien, selektif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Menjamin Konsistensi Pencapaian Program Prioritas Daerah.
Agar pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah tetap berjalan optimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.
- Menjaga Keseimbangan dan Stabilitas Fiskal Daerah.
Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui penyesuaian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sehingga struktur APBD tetap seimbang dan terkendali.
- Meningkatkan Kualitas Penganggaran.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan manajemen pengelolaan anggaran, agar APBD lebih responsif terhadap perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

1.2. Dasar penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor);
 30. Peraturan Bupati Belitung Timur NomorTahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur No Tahun 2025)

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih teknis mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang Terdiri Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menetapkan kerangka pendanaan ini diantaranya adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi terhadap penerimaan masing-masing jenis PAD;
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bentuk regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- 3) Penyusunan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Melakukan inovasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Optimalisasi kegiatan pendataan wajib pajak antara lain :



- Pemetaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah melalui penguatan database pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Mengupayakan pencarian sumber-sumber PAD yang baru.
- b. Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 9) Melakukan penagihan aktif dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan daerah;
- 10) Melakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, terutama penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan analisis potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 793.908.493.067 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (25.174.582.000) atau (3,07%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 819.083.075.067, rincian tersebut dapat dilihat pada :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp127.333.314.067, atau sama dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak mengalami peningkatan;
- b) Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp.665.325.429.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(25.174.582.000) atau (3,65%) dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 690.500.011.000; dan
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 1.249.750.000 atau tidak mengalami perubahan dari APBD 2025

TABEL 2.1
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024– 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	APBD 2025	TARGET PERUBAHAN APBD 2025
	APBD 2024		
PENDAPATAN DAERAH	846.356.884.184,23	819.083.075.067	793.908.493.067
Pendapatan Asli Daerah	99.803.408.919,23	127.333.314.067	127.333.314.067
Pendapatan Transfer	746.071.353.252,00	690.500.011.000	665.325.429.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	482.122.013,00	1.249.750.000	1.249.750.000

Sumber data: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Secara umum, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan Anggaran dibandingkan dengan alokasi Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 127.333.314.067.



Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dari komponen Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 65.042.000.000, atau tidak mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya.
- b. Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dari komponen Retribusi Daerah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp.7.467.456.692 mengalami penurunan sebesar Rp (446.704.500) atau sebesar (5,64%) dibandingkan target Retribusi Daerah pada APBD TA. 2025 sebesar Rp. 7.914.161.192. Penyesuaian anggaran pendapatan retribusi daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan karena adanya pengalihan pendapatan BLUD dari komponen retribusi daerah ke dalam pendapatan lain-lain PAD yang sah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 5.523.052.522 dan tidak mengalami perubahan anggaran dibandingkan dengan alokasi sebelumnya
- d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dari komponen Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 49.300.804.853 meningkat sebesar Rp. 446.704.500 atau sebesar 0,91%% dibandingkan target Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD TA. 2025 sebesar Rp. 48.854.100.353. Proyeksi diasumsikan mengalami peningkatan dikarenakan adanya surplus pendapatan pada Rumah Sakit Daerah dimana sudah menerapkan pola keuangan BLUD. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan penerimaan melalui lain-lain PAD yang sah, salah satu hal yang akan didorong adalah kemandirian BLUD sehingga diharapkan akan mengurangi ketergantungan BLUD terhadap APBD

Penjabaran Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

TABEL 2.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024-2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET APBD 2025	TARGET PERUBAHAN APBD 2025
	APBD 2024		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.803.408.919,23	127.333.314.067	127.333.314.067
Pajak daerah	45.008.024.533,50	65.042.000.000	65.042.000.000



KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET APBD 2025	TARGET PERUBAHAN APBD 2025
	APBD 2024		
Retribusi daerah	7.621.143.001,00	7.914.161.192	7.467.456.692
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.814.815.725,37	5.523.052.522	5.523.052.522
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	42.359.425.659,36	48.854.100.353	49.300.804.853

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2025

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows* program. Pendapatan dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa merupakan dana transfer yang termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan pemberian Pendapatan Transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah.

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi dana perimbangan APBD tahun anggaran 2024, target APBD tahun anggaran 2025 dan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2025.

TABEL 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 – 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	TARGET APBD 2025	TARGET PERUBAHAN APBD 2025
	APBD 2024		
PENDAPATAN TRANSFER	746.071.353.252	690.500.011.000	665.325.429.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	703.539.971.834	656.750.011.000	631.575.429.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.531.381.418	33.750.000.000	33.750.000.000

Sumber data : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2025

Pendapatan Transfer pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 665.325.429.000 mengalami penurunan sebesar Rp. (25.174.582.000) atau sebesar (3,65%) dibandingkan dengan Pendapatan Transfer pada APBD TA. 2025 sebesar Rp. 690.500.011.000. Adapun Komponen Pendapatan Transfer tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer pada Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 631.575.429.000 mengalami penurunan sebesar Rp. (25.174.582.000) atau (3,83%) dari alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA. 2025 sebesar Rp. 656.750.011.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 33.750.000.000 dan tidak mengalami perubahan anggaran dibandingkan dengan alokasi Anggaran sebelumnya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.249.750.000 atau tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp. 1.249.750.000.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Komponen Pendapatan Hibah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 249.750.000 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan target Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2025

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.000.000.000 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada APBD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut yang mencapai sebesar Rp. 793.908.493.067 dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah memberi kontribusi sebesar Rp. 127.333.314.067 atau sebesar 16,04%, Pendapatan Transfer memberi kontribusi sebesar Rp. 665.325.429.000 atau sebesar 83,80% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberi kontribusi sebesar Rp. 1.249.750.000 atau sebesar 0,16%

Berdasarkan target pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka jumlah Dana Tersedia yang dapat dimanfaatkan guna pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan dari Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 793.908.493.067.



TABEL 2.4
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TA.2025	TARGET P-PPAS TA.2025
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	819.083.075.067	793.908.493.067
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.333.314.067	127.333.314.067
4.1.01	Pajak Daerah	65.042.000.000	65.042.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	370.000.000	370.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	263.750.000	263.750.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	263.750.000	263.750.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	95.000.000	95.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	95.000.000	95.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.250.000	11.250.000,
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.250.000	11.250.000,
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000	70.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	70.000.000	70.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	70.000.000	70.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000	125.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000	125.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000	125.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.800.000.000	25.800.000.000
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	5.000.000	5.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	5.000.000	5.000.000
4.1.01.14.15	Pajak Kaolin	500.000.000	500.000.000
4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	500.000.000	500.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000	1.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000	1.000.000
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	23.794.000.000	23.794.000.000
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	23.794.000.000	23.794.000.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.500.000.000	1.500.000.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.500.000.000	1.500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.550.000.000	4.550.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	4.550.000.000	4.550.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.550.000.000	4.550.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.950.000.000	3.950.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.075.000.000	2.075.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.075.000.000	2.075.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.875.000.000	1.875.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.875.000.000	1.875.000.000
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.495.000.000	13.495.000.000
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.485.000.000	1.485.000.000
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	300.000.000	300.000.000
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.185.000.000,	1.185.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	11.700.000.000,00	11.700.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.700.000.000,00	11.700.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	135.000.000,00	135.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	135.000.000,00	135.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	160.000.000,00	160.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	46.000.000,00	46.000.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	4.000.000,00	4.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	4.000.000,00	4.000.000,00



KODE	URAIAN	APBD TA.2025	TARGET P-PPAS TA.2025
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	24.000.000,00	24.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.936.000.000,00	10.936.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	10.936.000.000,00	10.936.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	10.936.000.000,00	10.936.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.746.000.000,00	5.746.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	5.746.000.000,00	5.746.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	5.746.000.000,00	5.746.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.914.161.192	7.467.456.692
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.132.401.280	4.685.696.780
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.964.301.280,00	3.479.096.780
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	799.301.280,00	314.096.780
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.165.000.000,00	3.165.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	808.100.000,00	808.100.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	808.100.000,00	808.100.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	252.000.000,00	290.500.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran		38.500.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	250.000.000,00	250.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	8.000.000,00	8.000.000
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.000.000,00	8.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.457.630.500,00	2.457.630.500
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	519.930.500,00	517.930.500,
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	5.540.000,00	5.540.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	73.200.000,00	73.200.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	132.060.500,00	131.060.500
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	243.300.000,00	243.300.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	40.830.000,00	39.830.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	630.000.000,00	630.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	630.000.000,00	630.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	27.000.000,00	27.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	27.000.000,00	27.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	160.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	160.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	64.600.000,00	64.600.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	64.600.000,00	64.600.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	9.600.000,00	9.600.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	9.600.000,00	9.600.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	84.500.000,00	86.500.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	84.500.000,00	86.500.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	5.000.000,00	5.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	5.000.000,00	5.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	927.000.000,00	927.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	115.000.000,00	115.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	812.000.000,00	812.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	30.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	324.129.412,00	324.129.412,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	229.900.000,00	229.900.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	229.900.000,00	229.900.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	94.229.412,00	94.229.412,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	94.229.412,00	94.229.412,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522,00	5.523.052.522,00



KODE	URAIAN	APBD TA.2025	TARGET P-PPAS TA.2025
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.523.052.522,00	5.523.052.522
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.523.052.522,00	5.523.052.522,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.523.052.522,00	5.523.052.522,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.854.100.353,00	49.300.804.853,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.567.481.190,00	3.567.481.190,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.567.481.190,00	3.567.481.190,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.567.481.190,00	3.567.481.190,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.995.000,00	20.995.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.550.000,00	1.550.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	50.000,00	50.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	700.000,00	700.000,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	550.000,00	550.000,00
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	50.000,00	50.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	50.000,00	50.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000,00	50.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	750.000,00	750.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	150.000,00	150.000,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000,00	100.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	50.000,00	50.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	50.000,00	50.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000,00	150.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	150.000,00	150.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	12.000,00	12.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	12.000,00	12.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	12.000,00	12.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	12.000,00	12.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.521.000,00	16.521.000,00



KODE	URAIAN	APBD TA.2025	TARGET P-PPAS TA.2025
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	16.521.000,00	16.521.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	56.600.000,00	18.100.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	39.000.000,00	500.000,00
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	38.500.000,00	0,00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	100.000,00	100.000,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	400.000,00	400.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	17.600.000,00	17.600.000,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000,00	100.000,00
4.1.04.13.02.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	150.000,00	150.000,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.04.13.02.0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	200.000,00	200.000,00
4.1.04.13.02.0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	150.000,00	150.000,00
4.1.04.13.02.0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	784.824.050,00	784.824.050,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	584.824.050,00	584.824.050,00
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	584.824.050,00	584.824.050,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41.559.200.113,00	42.044.404.613,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41.225.467.167,00	41.706.671.667,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41.225.467.167,00	41.706.671.667,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	235.000.000,00	235.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	235.000.000,00	235.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	98.732.946,00	102.732.946,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	98.732.946,00	102.732.946,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	690.500.011.000,00	665.325.429.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.750.011.000,00	631.575.429.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	39.418.079.000,00	39.418.079.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	39.418.079.000,00	39.418.079.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	39.418.079.000,00	39.418.079.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.362.621.000,00	14.324.031.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	14.362.621.000,00	14.324.031.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	14.362.621.000,00	14.324.031.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.758.856.000,00	42.758.856.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	19.588.668.000,00	19.588.668.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	12.890.070.000,00	12.890.070.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.698.598.000,00	6.698.598.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	19.429.874.000,00	19.429.874.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	408.165.000,00	408.165.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	15.577.908.000,00	15.577.908.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	278.991.000,00	278.991.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	3.164.810.000,00	3.164.810.000,00



KODE	URAIAN	APBD TA.2025	TARGET P-PPAS TA.2025
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.740.314.000,00	3.740.314.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.740.314.000,00	3.740.314.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	463.379.546.000,00	438.079.394.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	378.948.344.000,00	378.948.344.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	378.948.344.000,00	378.948.344.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	84.431.202.000,00	59.131.050.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	25.238.567.000,00	25.238.567.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26.411.620.000,00	26.411.620.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.480.863.000,00	7.480.863.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	25.300.152.000,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.830.909.000,00	96.995.069.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	15.927.944.000,00	15.927.944.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200.000.000,00	200.000.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	617.018.000,00	617.018.000,00
4.2.01.09.01.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.110.926.000,00	15.110.926.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	80.902.965.000,00	81.067.125.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.342.330.000,00	18.342.330.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.044.500.000,00	1.044.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.035.531.000,00	45.035.531.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	606.750.000,00	606.750.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.058.240.000,00	2.058.240.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	532.400.000,00	532.400.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.119.200.000,00	2.119.200.000,00
4.2.01.09.02.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	734.910.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.251.003.000,00	5.251.003.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	50.502.000,00	50.502.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.621.909.000,00	4.621.909.000
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		734.910.000,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian		164.160.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.250.000.000,00	21.250.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000,00	249.750.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	249.750.000,00	249.750.000,00
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	249.750.000,00	249.750.000,00
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	249.750.000,00	249.750.000,00



KODE	URAIAN	APBD TA.2025	TARGET P-PPAS TA.2025
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	819.083.075.067,00	793.908.493.067,00



BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD.

Belanja Daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah tersebut antara lain:

1. Pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk area Perencanaan dan Penganggaran, agar penyusunan Perubahan APBD TA. 2025 tepat waktu.
2. Belanja yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (Bidang PPPK, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan), Dana Insentif Fiskal Daerah dan Dana Alokasi Khusus dan TPP gaji 13 dan 14 dengan persentase 100%.
3. Mengalokasikan Belanja *mandatory spending* pada Perubahan APBD TA. 2025, antara lain :
 - a. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD;
 - b. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan pajak/retribusi;
 - c. Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
 - d. Belanja Pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja Daerah;
 - e. Belanja Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari belanja Daerah;
 - f. Belanja Pengawasan paling sedikit sebesar 1,00 % (satu persen) dari total belanja Daerah.
 - g. Belanja anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Tabel 3. 1
Alokasi Pagu Belanja Wajib

Uraian	Mandatory		P-KUA-P-PPAS TA. 2025	
	Persentase	Pagu Minimal (Rp)	Persentase	Anggaran
Pendidikan	20%	169.491.575.387	25,96%	219.980.910.358
Belanja infrastruktur publik	40%	301.252.222.475	23.77	179.040.310.679
ADD	10%	48.083.825.000	10%	48.083.825.000



Uraian	Mandatory		P-KUA-P-PPAS TA. 2025	
	Persentase	Pagu Minimal (Rp)	Persentase	Anggaran
Pengawasan	1,00%	8.474.578.769	0,40%	3.430.194.600
pendidikan dan pelatihan bagi ASN	0,16%	1.355.932.603	0,12%	1.050.502.900
Bagi Hasil Pajak/Retribusi ke Pemerintah Desa	10%	6.825.416.750	10%	6.825.416.750
hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB	10%	1.093.600.000	5,70%	623.592.200
hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik	10%	1.170.000.000	14,54%	1.700.853.000
hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota	50%	5.000.000.000	50%	5.000.000.000
hasil penerimaan PAT	10%	7.000.000	443%	310.042.150

4. Pada Jenis Belanja pegawai terdapat penambahan anggaran wajib yang harus dipenuhi antara lain Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan pada semua OPD.
5. Pada jenis Belanja Transfer, terjadi penyesuaian pada :
 - a. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke desa akibat perubahan target pajak dan retribusi daerah, dan kurang bayar tahun sebelumnya
 - b. Pemenuhan 10% Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan bertambahnya pendapatan DBH

Dengan mempertimbangkan kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka untuk melihat perubahan kemampuan pembiayaan pembangunan di tahun 2025 perlu untuk menghitung kebutuhan wajib dan mengikat yang harus disediakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Belitong Timur

Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan daerah, maka Belanja Daerah pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 847.457.876.936 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (124.450.352.565) atau (12,80%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 971.908.229.501. dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 470.427.121.404 atau mengalami penurunan sebesar



- Rp.(14.954.394.046) atau (3,08%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 485.381.515.450.
2. Belanja Barang dan Jasa pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 217.813.294.567 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (66.005.316.825) atau (23,26%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp.283.818.611.392.
 3. Belanja Hibah pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 9.986.168.803 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 192.588.000 atau 1,97% dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 9.793.580.803.
 4. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2.970.000.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (120.000.000) atau (3,88%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 3.090.000.000.
 5. Belanja Modal pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 50.933.971.412 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (41.033.214.494) atau (9,18%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 91.967.185.906.
 6. Belanja Tidak Terduga pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau tidak mengalami perubahan dari APBD tahun anggaran 2025..
 7. Belanja Transfer pada perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 94.327.320.750 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(2.530.015.200) atau (2,61%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 96.857.335.950

Berikut ini disajikan belanja daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dengan APBD Tahun Anggaran 2025.

TABEL 3.2
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	TARGET P-P-PPAS TA. 2025
5.1	Belanja Operasi	782.083.707.645	701.196.584.774
5.1.01	Belanja Pegawai	485.381.515.450	470.427.121.404
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	272.927.446.544	259.155.823.342
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	181.043.856.251	179.986.757.907
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.282.897.977	48.160.990.477,
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.079.487.000	12.959.287.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	582.956.500	577.484.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000	621.600.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	17.126.169.155	17.126.169.155
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.818.611.392	217.813.294.567
5.1.02.01	Belanja Barang	62.361.540.870	39.819.252.245
5.1.02.02	Belanja Jasa	104.367.330.474	94.675.198.074



KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	TARGET P-P-PPAS TA. 2025
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.183.713.800	12.070.868.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.673.445.600	22.024.005.400,
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.224.940.000	3.092.730.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.134.264.500,	16.134.264.500
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.498.308.810	4.621.908.810
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.375.067.338	25.375.067.338,
5.1.05	Belanja Hibah	9.793.580.803,	9.986.168.803
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000	2.970.000.000,
5	Belanja Modal	91.967.185.906	50.933.971.412
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.635.151.436	11.581.661.936
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.342.452.006,	21.098.046.306
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.402.047.864	16.744.703.570
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.487.534.600	1.409.559.600
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	100.000.000
5.3	Belanja Tidak terduga	1.000.000.000	1.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	96.857.335.950	94.327.320.750
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.825.416.750	6.825.416.750
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	90.031.919.200	87.501.904.000

Sumber data: BPKPD Kabupaten Belitong Timur, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan alokasi belanja khususnya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum yang dapat dijelaskan bahwa alokasi terbesar adalah untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain Urusan Pada Setiap OPD, Ada dua kelompok Urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD se-Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu urusan penunjang dan urusan konkuren. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 (tidak termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten) dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (Delapan belas) urusan wajib Non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan, 1(satu) unsur pengawasan, 1 (satu) unsur kewilayahan - Kecamatan, 1 (satu) urusan pemerintahan umum dan 1 (satu) unsur pendukung urusan pemerintahan.

5.2.1. Program-program Prioritas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.2.1.1. Pendidikan

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan diarahkan pada

- pendidikan sekolah dasar yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pendidikan SMP yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Pendidikan PAUD yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- Pendidikan Non Formal yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
-

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kegiatan diarahkan pada

- Pendidikan dasar yaitu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yaitu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

3) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kegiatan diarahkan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4) PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

5.2.1.2. Kesehatan

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesehatan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Vaksin, Pengadaan Bahan Habis Pakai, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana dan Pengelolaan Surveilans Kesehatan

2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan diarahkan pada : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standard dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan

3) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Kegiatan diarahkan pada : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Kegiatan diarahkan pada : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

5.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup 9 (sembilan) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya, Pembangunan Kanal Banjir, Rehabilitasi Kanal Banjir, Rehabilitasi Kanal Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Pembangunan Bendung Irigasi, Rehabilitasi Irigasi Permukaan.

2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan,

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, serta Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan.

5) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Dengan Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

6) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.

7) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

8) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan diarahkan pada : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

9) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan diarahkan pada Pemenuhan cakupan ketersediaan rumah layak huni

Dengan Sub Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan diarahkan pada tercapainya persentase penyelenggaraan jasa konstruksi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan kegiatan yang diarahkan pada: sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil.

3) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan diarahkan pada tercapainya persentase permukiman yang tertata dengan kegiatan yang diarahkan pada : Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan melakukan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

4) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan diarahkan pada terpenuhinya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan kegiatan diarahkan pada : Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan dengan melakukan perencanaan penyediaan PSU di Perumahan, dan Penyediaan Prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian.

5.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu(1) PD Satpol PP dan (2) PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Satpol PP

a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat; Pengendalian keamanan, Penegakan dan penindakan pelanggaran perda, Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba, Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Kegiatan diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran; Recruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran; Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; serta Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

c. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan diarahkan pada Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam; Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara; Pelatihan dan simulasi penanganan bencana; serta Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana.

5.2.1.6. Sosial

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Sosial ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut

1) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial berupa Pemberian Layanan Data dan

Pengaduan, Pemberian Layanan Kedaruratan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Rujukan, dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan diarahkan pada : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Rujukan Anak-Anak Terlantar, Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

4) PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

5) PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Kegiatan diarahkan pada : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

6) PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan diarahkan pada : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

5.2.2. Program-program Prioritas pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.2.2.1. Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Kegiatan diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kegiatan diarahkan pada Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja,

dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

4) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan diarahkan pada Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan diarahkan pada Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.2.3. Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian dan Pangan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemadirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berupa penyediaan infrastruktur lumbung pangan.

2) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

3) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

kegiatan diarahkan pada : Penyusunan, Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota.

4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota.

5.2.2.4. Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan diarahkan pada: Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5.2.2.5. Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup, mencakup 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

kegiatan diarahkan pada : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

kegiatan diarahkan pada : Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

kegiatan diarahkan pada : Penyimpanan sementara Limbah B3.

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

kegiatan diarahkan pada : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

kegiatan diarahkan pada : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

7) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

8) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

kegiatan diarahkan pada : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/Kota

10) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Sampah

5.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

kegiatan diarahkan pada : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2) PROGRAM PENCATATAN SIPIL

kegiatan diarahkan pada : Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif, Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil dan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

3) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

kegiatan diarahkan pada : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4) PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain

5.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENATAAN DESA

Kegiatan diarahkan pada Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa, Fasilitas Tata Wilayah Desa, Fasilitas Penataan Kewenangan Desa, Fasilitas Penamaan dan Kode Desa Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

2) PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Kegiatan diarahkan pada Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

3) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan diarahkan pada Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa, Fasilitas Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa dan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan diarahkan pada Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

5.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian dan Penduduk ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan diarahkan pada : Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Keluarga Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal, Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK, Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan, dan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan diarahkan pada : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.

5.2.2.9. Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perhubungan, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan diarahkan pada tercapainya presentase pemenuhan infrastruktur lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan kegiatan diarahkan pada : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota melalui penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupatane/kota termasuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dan juga pengembangan sarana dan prasarana terminal, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir melalui koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Kegiatan diarahkan pada tercapainya persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran kegiatan diarahkan pada : pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai atau danau.

5.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan diarahkan pada: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan diarahkan pada: Pengelolaan Nama domain dan sub domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

kegiatan diarahkan pada : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

kegiatan diarahkan pada : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

kegiatan diarahkan pada : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

kegiatan diarahkan pada : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

kegiatan diarahkan pada : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

6) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

kegiatan diarahkan pada : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

5.2.2.12. Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Penetapan pemberian fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

5) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Pengeloalaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

5.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira usaha Pemula, Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten, Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang meliputi perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan, Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota, Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tk Daerah, Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

5.2.2.14. Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan diarahkan pada: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral, peningkatan kapasitas SDM pemerintahan daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi, membangun metadata statistic sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, pengembangan infrastruktur serta penyelenggaraan otorisasi statistic sektoral di daerah.

5.2.2.15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan diarahkan pada: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

5.2.2.16. Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Kegiatan diarahkan pada : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupate/Kota.

3) PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Kegiatan diarahkan pada : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Kegiatan diarahkan pada : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

5) PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

5.2.2.17. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perpustakaan, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Bahan Pustaka, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dan Pengembangann Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2) PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno, Pengembangan, Pengolahan dan

Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan dan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

5.2.2.18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perpustakaan, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan diarahkan pada Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Kegiatan diarahkan pada Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana dan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

3) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

5.2.3. Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Program prioritas untuk Urusan Pemerintahan Pilihan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur mencakup 5 (lima) urusan sebagai berikut :

5.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Karenanya Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur hanya menyelenggarakan bidang perikanan yang diselenggarakan oleh PD Dinas Perikanan dengan program prioritas mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

kegiatan diarahkan pada : Penertiban Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penertiban Tanda Daftar bagi Pemudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

3) PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

kegiatan diarahkan pada : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan diarahkan pada: Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.3.2. Pariwisata

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata diselenggarakan oleh PD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan diarahkan pada : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

5.2.3.3. Pertanian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh PD Dinas Pertanian dan Pangan mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pengawasan penggunaan sarana pertanian, Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota, Penyediaan benih/ bibit ternak dan Hiajuan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.

3) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

kegiatan diarahkan pada : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota.

5) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Penertiban Izin Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

5.2.3.4. Perdagangan

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan diselenggarakan oleh PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

kegiatan diarahkan pada : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.

4) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

kegiatan diarahkan pada :

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota

5) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

kegiatan diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.

5.2.3.5. Perindustrian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian diselenggarakan oleh PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan mencakup 3 (Tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

kegiatan diarahkan pada : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

kegiatan diarahkan pada : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota,

5.2.4. Program-program Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.4.1. Perencanaan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan diselenggarakan oleh PD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

1) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka agar dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dapat tersusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan petunjuk teknis maka kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan diarahkan agar seluruh program terdapat kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD dan antara RKPD dengan APBD maka kegiatan yang dilakukan adalah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Infrastruktur dan Kewilayahan

5.2.4.2. Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan diselenggarakan oleh PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan diarahkan kepada Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum dan ketepatan waktu realisasi SP2D dan penyampaian laporan keuangan juga ketepatan waktu penetapan Raperda APBD dan Perubahan APBD. Untuk itu maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan diarahkan agar terdapat kesesuaian barang milik daerah dengan nilai asset di neraca, sehingga kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan diarahkan agar tercapai kemandirian keuangan daerah dengan upaya yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

5.2.4.3. Kepegawaian

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian diselenggarakan oleh PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu

1) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan diarahkan pada Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN dengan kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5.2.4.4. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu

1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan diarahkan kepada Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5.2.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan diselenggarakan oleh PD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan diarahkan pada Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sehingga kegiatan yang dilakukan adalah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

5.2.5. Program-program Prioritas pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh PD Inspektorat mencakup pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan diarahkan pada persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/ inspektorat, sehingga kegiatan yang dilakukan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

2) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan diarahkan kepada persentase OPD yang menyatakan puas atas layanan inspektorat, sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

5.2.6. Program-program Prioritas pada Unsur Kewilayahan - Kecamatan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh PD Kecamatan mencakup pelaksanaan 5 (lima) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan diarahkan kepada tercapainya nilai tertinggi indeks kepuasan masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2. Kecamatan Damar

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

3. Kecamatan Kelapa Kampit

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

4. Kecamatan Simpang Renggang

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

5. Kecamatan Gantung

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

6. Kecamatan Dendang

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

7. Kecamatan Simpang Pesak

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan diarahkan kepada tercapainya persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Kecamatan Damar
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Kecamatan Kelapa Kampit
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Kecamatan Simpang Renggang
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. Kecamatan Gantung
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. Kecamatan Dendang
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7. Kecamatan Simpang Pesak
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan diarahkan kepada Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Kecamatan Damar
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Kecamatan Kelapa Kampit
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Kecamatan Simpang Renggang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Kecamatan Gantung
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6. Kecamatan Dendang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Kecamatan Simpang Pesak
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan diarahkan kepada Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2. Kecamatan Damar
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
3. Kecamatan Kelapa Kampit
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Kecamatan Simpang Renggang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Kecamatan Gantung

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Kecamatan Dendang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

7. Kecamatan Simpang Pesak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan diarahkan kepada Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kecamatan Damar

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. Kecamatan Kelapa Kampit

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Kecamatan Simpang Renggang

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Kecamatan Gantung

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Kecamatan Dendang

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7. Kecamatan Simpang Pesak

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5.2.7. Program-program prioritas pada Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup pelaksanaan 5 (lima) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan dan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan,

2) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengawasan tentang politik serta budaya politik yang ada di masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan dan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilahan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peran dan fungsi ormas/LSM/OKP, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- 4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan keselarasan masyarakat dalam menyikapi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- 5) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social

5.2.8. Program-program Prioritas pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

5.2.8.1. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Unsur Pendukung Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh PD Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

- 1) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan diarahkan kepada fasilitasi kerjasama daerah, kebijakan dan pembinaan keagamaan serta persentase regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran. Dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
- 2) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam, Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kenaikan tingkat Kematangan UKPBJ, sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pemantauan kebijakan sumber daya alam dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
- 3) PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
Kegiatan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan pimpinan aparatur perangkat daerah dan indeks kematangan perangkat daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan penataan organisasi.

5.2.8.2. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Unsur Pendukung Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh PD Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan satu Program, yaitu :

1) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan diarahkan kepada persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Pembahasan Kebijakan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Fasilitasi Tugas DPRD.

Berdasarkan alokasi Belanja, khususnya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum yang dapat dijelaskan bahwa alokasi terbesar adalah untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Berikut ini disajikan perkiraan alokasi belanja untuk membiayai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Belitung Timur dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berbagai urusan pemerintahan :

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	236.713.817.262,00	225.215.769.958,00	-11.498.047.304,00	
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	236.713.817.262,00	225.215.769.958,00	-11.498.047.304,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.430.626.800,00	40.653.533.636,00	-7.777.093.164,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.354.013.500,00	23.225.094.400,00	-3.128.919.100,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000,00	240.000.000,00	-240.000.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000,00	474.460.000,00	-249.825.000,00	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	439.000.000,00	439.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000,00	734.900.000,00	-146.980.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000,00	408.950.000,00	0,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000,00	336.024.000,00	0,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.412.200,00	518.106.200,00	-144.306.000,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	555.400,00	505.400,00	-50.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.195.400,00	91.204.200,00	-7.991.200,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	49.999.600,00	-400,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000,00	15.426.600.000,00	-200.000.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600,00	29.992.300,00	-300,00	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000,00	28.620.000,00	-490.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.834.700,00	29.834.700,00	0,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.129.800,00	28.986.300,00	-5.143.500,00	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.492.000,00	20.692.000,00	-8.800.000,00	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.822.600,00	9.200.000,00	-20.622.600,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.545.600,00	191.545.600,00	0,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000,00	904.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000,00	402.000.000,00	-203.000.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400,00	44.559.800,00	-5.431.600,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.447.000.000,00	1.647.000.000,00	-1.800.000.000,00	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300,00	1.000.914.300,00	0,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.008.456.700,00	9.550.432.300,00	-3.458.024.400,00	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000,00	149.328.000,00	0,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000,00	400.718.000,00	-999.159.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000,00	97.714.000,00	-403.288.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000,00	110.426.200,00	-129.173.800,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.542.900,00	180.542.900,00	0,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.000,00	465.297.700,00	-150.000.300,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	550.000,00	502.400,00	-47.600,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	117.406.000,00	87.941.000,00	-29.465.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800,00	19.999.500,00	-300,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000,00	6.985.000.000,00	-250.000.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600,00	19.992.600,00	0,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700,00	27.478.500,00	-2.516.200,00	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.399.900,00	27.601.600,00	-1.798.300,00	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	28.799.900,00	27.113.000,00	-1.686.900,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800,00	5.852.800,00	-19.140.000,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400,00	19.999.400,00	0,00	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600,00	14.992.600,00	0,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200,00	30.745.200,00	0,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000,00	109.994.000,00	0,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900,00	174.999.900,00	0,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000,00	594.193.000,00	0,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.248.516.800,00	6.807.652.600,00	-440.864.200,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.201.744.000,00	1.201.744.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000,00	68.907.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.527.480.000,00	1.519.440.000,00	-8.040.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	78.862.000,00	64.276.000,00	-14.586.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000,00	138.791.000,00	-79.587.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000,00	2.058.240.000,00	-141.760.000,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600,00	15.335.600,00	0,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000,00	127.210.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000,00	600.360.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000,00	50.130.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	70.850.000,00	64.850.000,00	-6.000.000,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200,00	541.969.000,00	-6.464.200,00	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000,00	356.400.000,00	-93.600.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.819.639.800,00	1.070.354.336,00	-749.285.464,00	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	555.400,00	505.400,00	-50.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900,00	19.729.900,00	0,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600,00	17.211.600,00	0,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000,00	552.200.000,00	-242.800.000,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500,00	19.816.500,00	0,00	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400,00	99.995.600,00	-10.800,00	
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000,00	241.724.000,00	-304.578.000,00	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200,00	40.136.536,00	-13.664,00	
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200,00	29.859.200,00	0,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600,00	49.175.600,00	0,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	149.702.300,00	93.915.200,00	-55.787.100,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.952.300,00	65.253.000,00	-35.699.300,00	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	28.137.500,00	20.399.800,00	-7.737.700,00	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.862.800,00	44.853.200,00	-9.600,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	48.750.000,00	28.662.200,00	-20.087.800,00	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200,00	28.662.200,00	0,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	139.348.800,00	89.209.000,00	-50.139.800,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	139.348.800,00	89.209.000,00	-50.139.800,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.549.000,00	54.549.000,00	-25.000.000,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.799.800,00	34.660.000,00	-25.139.800,00	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	65.058.500,00	65.054.000,00	-4.500,00	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.058.500,00	65.054.000,00	-4.500,00	
1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400,00	30.072.400,00	0,00	
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100,00	34.981.600,00	-4.500,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.929.080.862,00	184.314.058.122,00	-3.615.022.740,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.828.400,00	3.547.100,00	-4.281.300,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.253.800,00	1.122.600,00	-1.131.200,00	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.085.600,00	589.600,00	-1.496.000,00	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.855.600,00	927.800,00	-927.800,00	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.633.400,00	907.100,00	-726.300,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	184.376.910.562,00	179.060.073.522,00	-5.316.837.040,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	184.376.910.562,00	179.060.073.522,00	-5.316.837.040,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.806.600,00	95.806.600,00	0,00	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	39.646.600,00	39.646.600,00	0,00	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.625.000,00	48.625.000,00	-15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	928.321.600,00	915.861.600,00	-12.460.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.572.300,00	34.572.300,00	0,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.727.000,00	194.727.000,00	0,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.544.900,00	26.544.900,00	0,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.525.500,00	135.525.500,00	0,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.351.900,00	70.351.900,00	0,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.600.000,00	4.140.000,00	-12.460.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.634.700,00	152.583.500,00	-403.051.200,00	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.583.500,00	152.583.500,00	0,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.072.334.000,00	3.617.780.800,00	2.545.446.800,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.900.000,00	237.900.000,00	0,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.844.000,00	3.372.690.800,00	2.547.846.800,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.620.000,00	419.780.000,00	-408.840.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.660.000,00	45.010.000,00	-27.650.000,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	482.580.000,00	101.390.000,00	-381.190.000,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.180.000,00	104.180.000,00	0,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	213.132.435.619,00	212.541.179.199,00	-591.256.420,00	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan	151.395.472.926,00	155.899.133.688,00	4.503.660.762,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.523.800,00	5.760.000,00	-19.763.800,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.523.800,00	5.760.000,00	-19.763.800,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	647.582.900,00	410.367.600,00	-237.215.300,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.994.500,00	17.850.700,00	-2.143.800,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000,00	93.767.100,00	-21.232.900,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.589.000,00	17.062.200,00	-2.526.800,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.999.600,00	67.871.100,00	-10.128.500,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.800,00	53.854.000,00	-26.145.800,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.000.000,00	9.962.500,00	-25.037.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.333.500,00	3.804.484.000,00	3.471.150.500,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.160.000,00	269.160.000,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.290.000,00	237.432.500,00	-343.857.500,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.252.500,00	-3.757.500,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.750.000,00	82.960.000,00	-197.790.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.530.000,00	29.900.000,00	-26.630.000,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	84.320.000,00	-115.680.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.487.996.880,00	45.845.437.601,00	11.357.440.721,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.220.111.200,00	20.784.418.201,00	13.564.307.001,00	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	2.523.970.000,00	3.584.518.806,00	1.060.548.806,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	9.136.990.720,00	9.136.990.720,00	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	595.100.000,00	2.575.501.000,00	1.980.401.000,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	108.612.700,00	226.819.800,00	118.207.100,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.842.017.600,00	5.137.333.775,00	1.295.316.175,00	
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	79.199.000,00	25.050.000,00	-54.149.000,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	71.211.900,00	98.204.100,00	26.992.200,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.227.245.680,00	25.031.829.400,00	-2.195.416.280,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	292.771.600,00	275.971.500,00	-16.800.100,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.204.400,00	41.204.400,00	0,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.499.900,00	72.027.000,00	-42.472.900,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.676.300,00	28.676.100,00	-200,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	342.320.000,00	342.320.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	822.209.600,00	410.697.500,00	-411.512.100,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.560.400,00	564.920.400,00	3.360.000,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.532.000,00	32.479.200,00	-52.800,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	561.655.100,00	337.497.700,00	-224.157.400,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	95.544.900,00	88.044.600,00	-7.500.300,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	785.473.800,00	53.766.800,00	-731.707.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	141.715.100,00	87.675.300,00	-54.039.800,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.781.600,00	55.807.600,00	-3.974.000,00	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.255.600,00	109.780.300,00	-27.475.300,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	97.033.600,00	68.546.100,00	-28.487.500,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.424.000,00	53.067.000,00	10.643.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	418.597.100,00	304.848.600,00	-113.748.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	229.999.780,00	209.618.400,00	-20.381.380,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	183.461.700,00	83.802.700,00	-99.659.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	404.850.600,00	156.760.900,00	-248.089.700,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.842.902.600,00	20.766.668.000,00	-76.234.600,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	64.473.000,00	16.900.000,00	-47.573.000,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	134.311.200,00	69.700.300,00	-64.610.900,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	575.021.000,00	583.280.000,00	8.259.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	128.390.800,00	217.769.000,00	89.378.200,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.640.000,00	19.640.000,00	-21.000.000,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.640.000,00	19.640.000,00	-21.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.489.728.100,00	905.230.500,00	-584.497.600,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	489.728.400,00	176.770.900,00	-312.957.500,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	244.995.000,00	102.400.000,00	-142.595.000,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400,00	74.370.900,00	-110.367.500,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.999.700,00	728.459.600,00	-271.540.100,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.999.700,00	728.459.600,00	-271.540.100,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10.992.300,00	10.992.300,00	0,00	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	5.999.100,00	5.999.100,00	0,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.999.100,00	5.999.100,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	307.728.600,00	274.712.200,00	-33.016.400,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.992.600,00	23.827.800,00	-41.164.800,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	64.992.600,00	23.827.800,00	-41.164.800,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.669.000,00	68.903.400,00	-43.765.600,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.669.000,00	68.903.400,00	-43.765.600,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.067.000,00	181.981.000,00	51.914.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	130.067.000,00	181.981.000,00	51.914.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.099.027.046,00	108.862.761.087,00	-6.236.265.959,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.889.013.046,00	104.404.716.987,00	-8.484.296.059,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.889.013.046,00	104.404.716.987,00	-8.484.296.059,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.333.500,00	3.804.484.000,00	3.471.150.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.173.500,00	3.534.324.000,00	3.471.150.500,00	
1.02.0.00.0.00.03.0001	RSUD Muhammad Zein	42.561.936.069,00	39.787.891.577,00	-2.774.044.492,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	972.199.500,00	426.757.500,00	-545.442.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	972.199.500,00	426.757.500,00	-545.442.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	972.199.500,00	426.757.500,00	-545.442.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.589.736.569,00	39.361.134.077,00	-2.228.602.492,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.481.300,00	58.498.800,00	-295.982.500,00	
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.681.400,00	58.498.800,00	-126.182.600,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.547.755.200,00	2.741.331.108,00	-1.806.424.092,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.547.755.200,00	2.741.331.108,00	-1.806.424.092,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	36.561.304.169,00	36.561.304.169,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	36.561.304.169,00	36.561.304.169,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0002	UPT Puskesmas Manggar	3.741.752.600,00	3.724.655.600,00	-17.097.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	824.527.000,00	837.520.000,00	12.993.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	64.437.000,00	25.432.000,00	-39.005.000,00	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	64.437.000,00	25.432.000,00	-39.005.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	752.890.000,00	812.088.000,00	59.198.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.160.000,00	90.360.000,00	70.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.880.000,00	43.200.000,00	16.320.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.760.000,00	11.520.000,00	-12.240.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	192.660.000,00	229.800.000,00	37.140.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.120.000,00	5.940.000,00	-9.180.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.020.000,00	25.515.000,00	-2.505.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.180.000,00	132.168.000,00	-12.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	196.820.000,00	233.405.000,00	36.585.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.300.000,00	10.960.000,00	-6.340.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	68.130.000,00	2.400.000,00	-65.730.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.902.135.600,00	2.887.135.600,00	-15.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.135.600,00	177.135.600,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.135.600,00	177.135.600,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0003	UPT Puskesmas Mengkubang	2.707.888.800,00	2.390.538.400,00	-317.350.400,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.051.838.600,00	804.493.400,00	-247.345.200,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	201.804.000,00	151.467.000,00	-50.337.000,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	149.967.000,00	149.967.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	51.837.000,00	1.500.000,00	-50.337.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.229.600,00	653.026.400,00	-40.203.200,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.275.000,00	47.300.000,00	25.025.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.320.000,00	26.400.000,00	4.080.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	145.821.600,00	100.998.400,00	-44.823.200,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.280.000,00	122.810.000,00	41.530.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	6.480.000,00	-11.520.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.080.000,00	8.820.000,00	-1.260.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	168.420.000,00	103.500.000,00	-64.920.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	152.123.000,00	193.153.000,00	41.030.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.640.000,00	13.625.000,00	4.985.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.280.000,00	600.000,00	-40.680.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.656.050.200,00	1.580.435.000,00	-75.615.200,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.797.200,00	337.957.200,00	-45.840.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.840.000,00	42.000.000,00	-45.840.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.957.200,00	295.957.200,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.112.000,00	130.336.800,00	-29.775.200,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.112.000,00	130.336.800,00	-29.775.200,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.112.141.000,00	1.112.141.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.112.141.000,00	1.112.141.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0004	UPT Puskesmas Gantung	3.542.202.600,00	2.967.767.000,00	-574.435.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	855.042.000,00	689.574.000,00	-165.468.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775.236.000,00	689.574.000,00	-85.662.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.520.000,00	67.760.000,00	44.240.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.920.000,00	36.960.000,00	11.040.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.860.000,00	20.640.000,00	6.780.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.947.000,00	162.630.000,00	3.683.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	10.380.000,00	-1.620.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.272.000,00	15.480.000,00	-7.792.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.355.000,00	128.464.000,00	-20.891.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	237.622.000,00	201.660.000,00	-35.962.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.200.000,00	11.520.000,00	-1.680.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	76.800.000,00	1.800.000,00	-75.000.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.194.000,00	6.930.000,00	-12.264.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.194.000,00	6.930.000,00	-12.264.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.194.000,00	6.930.000,00	-12.264.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.667.966.600,00	2.271.263.000,00	-396.703.600,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.045.800,00	108.449.600,00	-121.596.200,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.997.300,00	24.997.300,00	0,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.877.200,00	40.496.300,00	-31.380.900,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.191.300,00	1.856.000,00	-6.335.300,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.980.000,00	31.100.000,00	-68.880.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.446.800,00	297.482.400,00	-147.964.400,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	74.250.000,00	-48.750.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.446.800,00	223.232.400,00	-99.214.400,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.263.000,00	111.120.000,00	-127.143.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.283.000,00	74.660.000,00	-105.623.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.980.000,00	36.460.000,00	-21.520.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.754.211.000,00	1.754.211.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.754.211.000,00	1.754.211.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.03.0005	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	2.935.074.824,00	2.716.899.634,00	-218.175.190,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	810.105.000,00	790.899.810,00	-19.205.190,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.505.000,00	790.899.810,00	54.394.810,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.020.000,00	66.780.000,00	35.760.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.720.000,00	36.120.000,00	-24.600.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	147.360.000,00	203.919.810,00	56.559.810,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	10.800.000,00	-4.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.355.000,00	11.040.000,00	-8.315.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.760.000,00	113.440.000,00	14.680.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	205.260.000,00	224.140.000,00	18.880.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.560.000,00	16.200.000,00	-360.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	33.630.000,00	60.300.000,00	26.670.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	98.340.000,00	1.900.000,00	-96.440.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	19.640.000,00	19.640.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.920.000,00	8.400.000,00	6.480.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.920.000,00	8.400.000,00	6.480.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.920.000,00	8.400.000,00	6.480.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.123.049.824,00	1.917.599.824,00	-205.450.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.415.700,00	33.187.000,00	-47.228.700,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.897.600,00	33.187.000,00	-17.710.600,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.606.900,00	207.245.600,00	-30.361.300,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000,00	28.800.000,00	-15.600.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.896.900,00	177.135.600,00	-14.761.300,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.570.000,00	139.710.000,00	-127.860.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.260.000,00	111.090.000,00	-86.170.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.310.000,00	28.620.000,00	-41.690.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.537.457.224,00	1.537.457.224,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.537.457.224,00	1.537.457.224,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0006	UPT Puskesmas Simpang Pesak	2.302.933.100,00	1.827.454.900,00	-475.478.200,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	906.743.000,00	652.940.000,00	-253.803.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.743.000,00	652.940.000,00	-83.803.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.880.000,00	80.640.000,00	38.760.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.240.000,00	26.640.000,00	-3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	8.400.000,00	-6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.580.000,00	165.960.000,00	-46.620.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	11.640.000,00	-7.560.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.680.000,00	19.560.000,00	-120.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	97.800.000,00	71.340.000,00	-26.460.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.563.000,00	208.040.000,00	41.477.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	44.280.000,00	41.400.000,00	-2.880.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	69.120.000,00	900.000,00	-68.220.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.420.000,00	6.085.000,00	-2.335.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.420.000,00	6.085.000,00	-2.335.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.420.000,00	6.085.000,00	-2.335.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.387.770.100,00	1.168.429.900,00	-219.340.200,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.063.200,00	114.686.900,00	-67.376.300,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.999.600,00	10.999.600,00	0,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.488.000,00	37.125.200,00	-4.362.800,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.575.800,00	30.865.900,00	-31.709.900,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.800,00	25.696.200,00	-4.303.600,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.261.400,00	156.143.000,00	-123.118.400,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.261.400,00	139.053.000,00	-85.208.400,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	17.090.000,00	-37.910.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	805.800.000,00	805.800.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	805.800.000,00	805.800.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0007	UPT Puskesmas Renggang	2.612.789.700,00	1.978.161.700,00	-634.628.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	885.662.500,00	608.254.000,00	-277.408.500,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	169.713.000,00	1.500.000,00	-168.213.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	99.918.000,00	1.500.000,00	-98.418.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	672.749.500,00	606.754.000,00	-65.995.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.180.000,00	50.880.000,00	11.700.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.600.000,00	28.560.000,00	6.960.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.880.000,00	4.680.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.010.000,00	179.120.000,00	14.110.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.920.000,00	7.200.000,00	-720.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.777.500,00	12.000.000,00	222.500,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.440.000,00	87.350.000,00	-37.090.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.762.000,00	197.660.000,00	27.898.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.120.000,00	10.600.000,00	-10.520.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.460.000,00	1.464.000,00	-84.996.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.550.000,00	20.810.000,00	-11.740.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.550.000,00	20.810.000,00	-11.740.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.550.000,00	20.810.000,00	-11.740.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.694.577.200,00	1.349.097.700,00	-345.479.500,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.300.800,00	155.774.900,00	-124.525.900,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.994.200,00	9.994.200,00	0,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.323.100,00	74.570.800,00	-30.752.300,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.980.900,00	14.337.300,00	-5.643.600,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.730.000,00	34.330.000,00	-29.400.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.272.600,00	12.542.600,00	-43.730.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.542.400,00	510.292.800,00	-180.249.600,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000,00	97.200.000,00	-4.800.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588.542.400,00	413.092.800,00	-175.449.600,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.394.000,00	146.690.000,00	-40.704.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.794.000,00	107.090.000,00	-40.704.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	536.340.000,00	536.340.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	536.340.000,00	536.340.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0008	UPT Puskesmas Dendang	1.332.385.000,00	1.248.676.700,00	-83.708.300,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	406.895.500,00	458.090.000,00	51.194.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	406.895.500,00	458.090.000,00	51.194.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.080.000,00	23.040.000,00	18.960.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.160.000,00	32.760.000,00	12.600.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.600.000,00	24.360.000,00	-3.240.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	93.542.500,00	136.110.000,00	42.567.500,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000,00	7.800.000,00	-1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.355.000,00	16.692.000,00	337.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.720.000,00	62.940.000,00	20.220.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	96.238.000,00	129.008.000,00	32.770.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.520.000,00	4.320.000,00	-1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	70.320.000,00	2.400.000,00	-67.920.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.880.000,00	8.100.000,00	2.220.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.880.000,00	8.100.000,00	2.220.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.880.000,00	8.100.000,00	2.220.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	846.109.500,00	782.486.700,00	-63.622.800,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.546.500,00	36.114.700,00	-18.431.800,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.296.300,00	13.291.700,00	-4.600,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.737.000,00	9.728.000,00	-9.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.095.000,00	13.095.000,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.772.000,00	119.334.000,00	-19.438.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.020.000,00	61.020.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.752.000,00	58.314.000,00	-19.438.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.543.000,00	110.790.000,00	-25.753.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.543.000,00	110.790.000,00	-25.753.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	516.248.000,00	516.248.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	516.248.000,00	516.248.000,00	0,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.318.814.271,00	25.904.753.056,00	-46.414.061.215,00	
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72.318.814.271,00	25.904.753.056,00	-46.414.061.215,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.668.119.860,00	948.604.400,00	-12.719.515.460,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.072.568.594,00	948.604.400,00	-10.123.964.194,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	349.972.006,00	349.120.400,00	-851.606,00	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000,00	599.484.000,00	0,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.640.170.400,00	1.903.604.100,00	-736.566.300,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.640.170.400,00	1.903.604.100,00	-736.566.300,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	399.240.000,00	375.285.600,00	-23.954.400,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.250.400,00	487.962.000,00	-31.288.400,00	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	399.127.500,00	399.127.500,00	0,00	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	617.949.000,00	641.229.000,00	23.280.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.646.250.000,00	5.148.338.000,00	-3.497.912.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.646.250.000,00	5.148.338.000,00	-3.497.912.000,00	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000,00	599.472.000,00	-599.472.000,00	
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000,00	299.752.000,00	-299.752.000,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000,00	449.757.000,00	0,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000,00	3.799.357.000,00	-2.598.688.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	700.000.000,00	522.373.000,00	-177.627.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	700.000.000,00	522.373.000,00	-177.627.000,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.884.000,00	-116.000,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300.000.000,00	122.489.000,00	-177.511.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	619.000.000,00	383.312.500,00	-235.687.500,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	619.000.000,00	383.312.500,00	-235.687.500,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	619.000.000,00	383.312.500,00	-235.687.500,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	23.304.075.880,00	4.550.024.460,00	-18.754.051.420,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	23.304.075.880,00	4.550.024.460,00	-18.754.051.420,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274,00	3.000.000.000,00	-5.499.050.274,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460,00	496.598.460,00	0,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600,00	1.053.426.000,00	-2.902.559.600,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	959.970.800,00	523.064.000,00	-436.906.800,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	524.999.600,00	424.231.800,00	-100.767.800,00	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	299.999.600,00	230.958.700,00	-69.040.900,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	225.000.000,00	193.273.100,00	-31.726.900,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	434.971.200,00	98.832.200,00	-336.139.000,00	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	274.971.500,00	64.118.500,00	-210.853.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	39.999.700,00	34.713.700,00	-5.286.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.798.264.100,00	500.656.300,00	-2.297.607.800,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	445.502.300,00	127.911.300,00	-317.591.000,00	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	198.967.300,00	127.911.300,00	-71.056.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	585.267.500,00	372.745.000,00	-212.522.500,00	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	295.854.000,00	212.375.000,00	-83.479.000,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.350.000,00	112.370.000,00	-31.980.000,00	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.519.171.631,00	11.424.776.296,00	-3.094.395.335,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.024.444.146,00	7.588.590.396,00	-3.435.853.750,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.024.444.146,00	7.588.590.396,00	-3.435.853.750,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	33.500.000,00	-31.500.000,00	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	14.000.000,00	-16.000.000,00	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	19.500.000,00	-15.500.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.581.000,00	374.625.900,00	-369.955.100,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.320.300,00	4.256.900,00	-15.063.400,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.910.100,00	63.878.900,00	-34.031.200,00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.946.000,00	18.816.800,00	-19.129.200,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.615.500,00	60.604.800,00	-59.010.700,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.924.400,00	19.608.500,00	-25.315.900,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.864.700,00	7.460.000,00	-17.404.700,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.137.085,00	2.702.240.000,00	1.385.102.915,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.600.000,00	-2.400.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	887.571.985,00	883.680.000,00	-3.891.985,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.565.100,00	1.815.960.000,00	1.391.394.900,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.010.000,00	725.820.000,00	-538.190.000,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.010.000,00	41.250.000,00	-3.760.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	767.200.000,00	261.350.000,00	-505.850.000,00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	199.920.000,00	199.920.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.950.000,00	199.950.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.930.000,00	23.350.000,00	-28.580.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.839.431.070,00	5.454.449.570,00	-14.384.981.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	449.428.200,00	351.872.600,00	-97.555.600,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000,00	342.600.000,00	-56.835.000,00	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000,00	342.600.000,00	-56.835.000,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200,00	9.272.600,00	-40.720.600,00	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200,00	9.272.600,00	-40.720.600,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	360.906.600,00	253.441.600,00	-107.465.000,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	311.095.000,00	253.441.600,00	-57.653.400,00	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000,00	253.441.600,00	-57.653.400,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.609.735.800,00	3.278.198.200,00	-331.537.600,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.609.735.800,00	3.278.198.200,00	-331.537.600,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.609.735.800,00	3.278.198.200,00	-331.537.600,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15.419.360.470,00	1.570.937.170,00	-13.848.423.300,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15.419.360.470,00	1.570.937.170,00	-13.848.423.300,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500,00	277.900.000,00	-22.073.500,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970,00	1.293.037.170,00	-13.826.349.800,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.343.597.364,00	15.370.564.476,00	-5.973.032.888,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	13.819.772.844,00	9.904.424.686,00	-3.915.348.158,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	849.887.400,00	1.907.884.000,00	1.057.996.600,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	539.151.800,00	119.931.000,00	-419.220.800,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	119.931.000,00	119.931.000,00	0,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	264.866.100,00	1.787.953.000,00	1.523.086.900,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99.941.500,00	1.787.953.000,00	1.688.011.500,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	349.149.100,00	126.432.500,00	-222.716.600,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	349.149.100,00	126.432.500,00	-222.716.600,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.205.000,00	126.432.500,00	-72.772.500,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.620.736.344,00	7.870.108.186,00	-4.750.628.158,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.117.126.544,00	7.329.794.486,00	-2.787.332.058,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.117.126.544,00	7.329.794.486,00	-2.787.332.058,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.976.300,00	102.347.100,00	-425.629.200,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.993.300,00	2.347.100,00	-72.646.200,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.200.000,00	53.446.600,00	-57.753.400,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.000.000,00	7.946.600,00	-28.053.400,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.200.000,00	45.500.000,00	-29.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.850.000,00	384.520.000,00	-457.330.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	658.090.000,00	384.520.000,00	-273.570.000,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.523.824.520,00	5.466.139.790,00	-2.057.684.730,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.886.830.700,00	1.676.687.700,00	-1.210.143.000,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	443.208.800,00	351.317.200,00	-91.891.600,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	43.208.800,00	24.828.800,00	-18.380.000,00	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,00	326.488.400,00	-73.511.600,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.230.127.500,00	1.174.253.500,00	-1.055.874.000,00	
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.138.100,00	49.130.900,00	-7.200,00	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	161.326.900,00	152.627.700,00	-8.699.200,00	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.200,00	19.388.700,00	-19.601.500,00	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.513.900,00	79.516.000,00	-10.997.900,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.862.191.900,00	863.431.200,00	-998.760.700,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.966.500,00	10.159.000,00	-17.807.500,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	213.494.400,00	151.117.000,00	-62.377.400,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	68.404.400,00	35.496.600,00	-32.907.800,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	145.090.000,00	115.620.400,00	-29.469.600,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.636.993.820,00	3.789.452.090,00	-847.541.730,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.293.000,00	2.943.000,00	-1.350.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.055.000,00	1.380.000,00	-675.000,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.238.000,00	1.563.000,00	-675.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.922.935.120,00	2.186.606.590,00	-736.328.530,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.922.935.120,00	2.186.606.590,00	-736.328.530,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.290.000,00	1.615.000,00	-675.000,00	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.290.000,00	1.615.000,00	-675.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.500.000,00	11.000.000,00	-49.500.000,00	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.500.000,00	11.000.000,00	-49.500.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.778.200,00	227.213.600,00	-182.564.600,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.600,00	14.031.900,00	-5.959.700,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.797.000,00	25.167.000,00	-9.630.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.800,00	24.414.100,00	-10.585.700,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.989.800,00	15.354.600,00	-14.635.200,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	23.246.000,00	-16.754.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.666.100,00	37.391.800,00	-41.274.300,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.666.100,00	37.391.800,00	-41.274.300,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.832.600,00	1.092.770.100,00	287.937.500,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.499.000,00	43.499.000,00	-4.000.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.920.000,00	67.420.000,00	-22.500.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	667.413.600,00	981.851.100,00	314.437.500,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.698.800,00	229.912.000,00	-123.786.800,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.780.000,00	164.640.000,00	-77.140.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.998.800,00	48.352.000,00	-46.646.800,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.887.839.326,00	5.274.950.264,00	-3.612.889.062,00	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.887.839.326,00	5.274.950.264,00	-3.612.889.062,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.026.740.300,00	11.100.000,00	-1.015.640.300,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.022.540.300,00	9.000.000,00	-1.013.540.300,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300,00	9.000.000,00	-903.858.300,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	320.425.500,00	235.408.500,00	-85.017.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	269.897.100,00	200.984.500,00	-68.912.600,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	72.067.900,00	71.630.000,00	-437.900,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	58.327.000,00	49.488.000,00	-8.839.000,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	55.221.900,00	55.080.200,00	-141.700,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.370.200,00	24.786.300,00	-19.583.900,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	50.528.400,00	34.424.000,00	-16.104.400,00	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.394.400,00	10.290.000,00	-104.400,00	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000,00	14.134.000,00	-6.000.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	227.881.300,00	47.474.900,00	-180.406.400,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.922.100,00	47.474.900,00	-153.447.200,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300,00	47.474.900,00	-147.450.400,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	719.456.600,00	48.525.000,00	-670.931.600,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	650.000.000,00	48.525.000,00	-601.475.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	650.000.000,00	48.525.000,00	-601.475.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.584.230.626,00	4.932.441.864,00	-1.651.788.762,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.420.691.826,00	3.007.504.364,00	-1.413.187.462,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.420.691.826,00	3.007.504.364,00	-1.413.187.462,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.687.800,00	298.300.100,00	-143.387.700,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.641.900,00	21.778.400,00	-15.863.500,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.486.300,00	47.009.300,00	-15.477.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.505.600,00	2.505.600,00	0,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.932.600,00	52.213.800,00	-14.718.800,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.523.400,00	13.395.000,00	-31.128.400,00	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000,00	18.000.000,00	-1.200.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	135.000.000,00	-65.000.000,00	
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.206.200,00	1.290.587.400,00	294.381.200,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.043.000,00	99.752.800,00	-8.290.200,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.080.000,00	87.600.000,00	-51.480.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749.083.200,00	1.103.234.600,00	354.151.400,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.584.000,00	336.050.000,00	-189.534.000,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.310.000,00	39.550.000,00	-3.760.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.480.000,00	128.690.000,00	-102.790.000,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.580.171.380,00	6.809.751.436,00	-1.770.419.944,00	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.580.171.380,00	6.809.751.436,00	-1.770.419.944,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	673.270.800,00	159.150.000,00	-514.120.800,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	673.270.800,00	159.150.000,00	-514.120.800,00	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800,00	159.150.000,00	-85.820.800,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	209.614.700,00	371.040.000,00	161.425.300,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	183.523.100,00	371.040.000,00	187.516.900,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.861.600,00	25.525.000,00	-30.336.600,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	6.125.000,00	-48.875.000,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	339.390.000,00	339.390.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.664.285.980,00	6.279.561.436,00	-1.384.724.544,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.684.700,00	2.284.600,00	-5.400.100,00	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.684.700,00	2.284.600,00	-5.400.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.021.615.280,00	5.087.317.336,00	-934.297.944,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.021.615.280,00	5.087.317.336,00	-934.297.944,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.871.900,00	175.094.600,00	-427.777.300,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.600,00	7.492.200,00	-7.497.400,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00	26.509.400,00	-26.490.600,00	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.958.000,00	15.427.200,00	-9.530.800,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.979.000,00	25.039.000,00	-19.940.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	15.635.800,00	-19.364.200,00	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.945.300,00	9.991.000,00	-19.954.300,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	75.000.000,00	-325.000.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.768.800,00	890.164.900,00	468.396.100,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.979.200,00	106.279.200,00	-2.700.000,00	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.589.600,00	781.685.700,00	471.096.100,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.226.800,00	124.700.000,00	-302.526.800,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.276.800,00	116.740.000,00	-202.536.800,00	
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	823.022.300,00	615.219.700,00	-207.802.600,00	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	823.022.300,00	615.219.700,00	-207.802.600,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.036.400,00	14.577.100,00	-22.459.300,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.036.400,00	14.577.100,00	-22.459.300,00	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.036.400,00	14.577.100,00	-22.459.300,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	298.589.200,00	196.514.200,00	-102.075.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.615.200,00	60.032.000,00	-24.583.200,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.615.200,00	60.032.000,00	-24.583.200,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000,00	136.482.200,00	-33.291.800,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000,00	136.482.200,00	-33.291.800,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.039.600,00	48.725.600,00	-4.314.000,00	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.039.600,00	48.725.600,00	-4.314.000,00	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.039.600,00	48.725.600,00	-4.314.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.100,00	46.227.000,00	-97.936.100,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.100,00	46.227.000,00	-97.936.100,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.100,00	46.227.000,00	-97.936.100,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	290.194.000,00	309.175.800,00	18.981.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.968.000,00	69.968.000,00	0,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000,00	69.968.000,00	0,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.826.000,00	150.807.800,00	18.981.800,00	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000,00	150.807.800,00	18.981.800,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	588.158.000,00	190.052.400,00	-398.105.600,00	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	588.158.000,00	190.052.400,00	-398.105.600,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	435.025.000,00	107.358.800,00	-327.666.200,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	85.191.200,00	72.238.600,00	-12.952.600,00	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600,00	44.521.600,00	-5.469.000,00	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600,00	20.519.000,00	-4.728.600,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000,00	7.198.000,00	-2.755.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	89.860.200,00	30.172.200,00	-59.688.000,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.860.200,00	30.172.200,00	-59.688.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	259.973.600,00	4.948.000,00	-255.025.600,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600,00	4.948.000,00	-5.025.600,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.821.000,00	14.136.800,00	-5.684.200,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.953.000,00	7.632.600,00	-2.320.400,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000,00	7.632.600,00	-2.320.400,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.868.000,00	6.504.200,00	-3.363.800,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000,00	6.504.200,00	-3.363.800,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	133.312.000,00	68.556.800,00	-64.755.200,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000,00	68.556.800,00	-64.755.200,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000,00	68.556.800,00	-64.755.200,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	449.110.000,00	246.290.000,00	-202.820.000,00	
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	449.110.000,00	246.290.000,00	-202.820.000,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	249.110.000,00	246.290.000,00	-2.820.000,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	249.110.000,00	246.290.000,00	-2.820.000,00	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.110.000,00	246.290.000,00	-2.820.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.247.966.608,00	12.444.940.450,00	-5.803.026.158,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	18.247.966.608,00	12.444.940.450,00	-5.803.026.158,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	199.999.900,00	64.259.500,00	-135.740.400,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	199.999.900,00	64.259.500,00	-135.740.400,00	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.900,00	64.259.500,00	-135.740.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.199.994.700,00	647.959.950,00	-552.034.750,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	999.999.225,00	627.992.950,00	-372.006.275,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800,00	57.058.000,00	-142.941.800,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	749.999.450,00	570.934.950,00	-179.064.500,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	49.999.875,00	7.208.000,00	-42.791.875,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.875,00	7.208.000,00	-42.791.875,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	149.995.600,00	12.759.000,00	-137.236.600,00	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	149.995.600,00	12.759.000,00	-137.236.600,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39.999.800,00	8.863.200,00	-31.136.600,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800,00	8.863.200,00	-31.136.600,00	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800,00	8.863.200,00	-31.136.600,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	66.986.400,00	13.312.000,00	-53.674.400,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.986.400,00	13.312.000,00	-53.674.400,00	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.994.800,00	13.312.000,00	-23.682.800,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	349.984.700,00	189.002.400,00	-160.982.300,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.984.700,00	189.002.400,00	-160.982.300,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000,00	189.002.400,00	-10.992.600,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	124.991.100,00	38.838.100,00	-86.153.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.991.100,00	38.838.100,00	-86.153.000,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.991.100,00	38.838.100,00	-86.153.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	4.205.000,00	2.250.000,00	-1.955.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	4.205.000,00	2.250.000,00	-1.955.000,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4.205.000,00	2.250.000,00	-1.955.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.471.439.800,00	2.165.641.800,00	-2.305.798.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.471.439.800,00	2.165.641.800,00	-2.305.798.000,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000,00	5.994.300,00	-5.700,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.000.000,00	2.160.000,00	-597.840.000,00	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Ban Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.815.439.800,00	2.157.487.500,00	-1.657.952.300,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.650.462.608,00	9.314.813.500,00	-2.335.649.108,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.171.271.508,00	6.291.630.600,00	-3.879.640.908,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.171.271.508,00	6.291.630.600,00	-3.879.640.908,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.329.100,00	114.151.300,00	-324.177.800,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.448.800,00	3.391.600,00	-3.057.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.898.500,00	29.423.000,00	-29.475.500,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.987.700,00	5.191.500,00	-3.796.200,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.994.100,00	17.168.400,00	-27.825.700,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	8.976.800,00	-10.023.200,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.121.600,00	2.781.271.600,00	2.498.150.000,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	2.200.000,00	-5.800.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.300.000,00	155.450.000,00	-850.000,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.821.600,00	2.623.621.600,00	2.504.800.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.970.000,00	127.760.000,00	-191.210.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.860.000,00	120.040.000,00	-78.820.000,00	
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.760.000,00	7.720.000,00	-12.040.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.230.545.788,00	5.267.231.246,00	-1.963.314.542,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.230.545.788,00	5.267.231.246,00	-1.963.314.542,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	128.457.300,00	15.360.900,00	-113.096.400,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	128.457.300,00	15.360.900,00	-113.096.400,00	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	49.717.300,00	15.360.900,00	-34.356.400,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	254.972.700,00	20.880.500,00	-234.092.200,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	160.020.700,00	20.185.300,00	-139.835.400,00	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	160.020.700,00	20.185.300,00	-139.835.400,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	94.952.000,00	695.200,00	-94.256.800,00	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	17.995.200,00	695.200,00	-17.300.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	54.976.600,00	16.807.500,00	-38.169.100,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	29.995.400,00	8.971.200,00	-21.024.200,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	29.995.400,00	8.971.200,00	-21.024.200,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.981.200,00	7.836.300,00	-17.144.900,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.981.200,00	7.836.300,00	-17.144.900,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.719.295.188,00	5.214.182.346,00	-1.505.112.842,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.710.291.488,00	3.689.661.446,00	-1.020.630.042,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.710.291.488,00	3.689.661.446,00	-1.020.630.042,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	825.027.800,00	406.896.300,00	-418.131.500,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.995.300,00	6.663.000,00	-6.332.300,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.265.100,00	209.069.200,00	-80.195.900,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.995.200,00	20.640.900,00	-29.354.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.928.000,00	5.475.600,00	-46.452.400,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.073.500,00	2.500.000,00	-4.573.500,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	600.000,00	-3.000.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	150.000.000,00	-200.000.000,00	
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.920.700,00	11.947.600,00	-14.973.100,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	345.335.000,00	49.788.600,00	-295.546.400,00	
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.335.000,00	49.788.600,00	-295.546.400,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.479.100,00	874.120.000,00	453.640.900,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.800.000,00	91.800.000,00	-30.000.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.279.100,00	781.120.000,00	484.840.900,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.805.000,00	193.716.000,00	-163.089.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.510.000,00	41.750.000,00	-3.760.000,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.530.000,00	109.490.000,00	-138.040.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.675.000,00	24.616.000,00	-59.000,00	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.090.000,00	17.860.000,00	-21.230.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.776.081.902,00	7.195.453.288,00	-1.580.628.614,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.776.081.902,00	7.195.453.288,00	-1.580.628.614,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.099.579.400,00	840.000.000,00	-259.579.400,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.099.579.400,00	840.000.000,00	-259.579.400,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	976.800.000,00	840.000.000,00	-136.800.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	679.443.500,00	226.999.900,00	-452.443.600,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	679.443.500,00	226.999.900,00	-452.443.600,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	550.193.800,00	226.999.900,00	-323.193.900,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.997.059.002,00	6.128.453.388,00	-868.605.614,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.823.000,00	-3.177.000,00	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.823.000,00	-3.177.000,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.524.131.702,00	5.118.040.088,00	-406.091.614,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.524.131.702,00	5.118.040.088,00	-406.091.614,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.275.800,00	232.324.300,00	-196.951.500,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	3.485.200,00	-6.514.800,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.999.700,00	37.210.700,00	-12.789.000,00	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	11.069.500,00	-18.930.500,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	34.428.500,00	-5.571.500,00	
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.700,00	9.257.400,00	-5.742.300,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.998.400,00	3.995.000,00	-21.003.400,00	
2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.233.800,00	644.126.000,00	124.892.200,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.999.600,00	11.555.100,00	-8.444.500,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.240.000,00	60.000.000,00	-39.240.000,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.994.200,00	572.570.900,00	172.576.700,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.541.000,00	132.140.000,00	-224.401.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.610.000,00	79.460.000,00	-144.150.000,00	
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.930.000,00	12.430.000,00	-37.500.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.419.057.700,00	2.119.205.000,00	-1.299.852.700,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	666.283.000,00	175.417.000,00	-490.866.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	484.859.500,00	175.417.000,00	-309.442.500,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	66.817.000,00	66.817.000,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.967.000,00	39.000.000,00	-36.967.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	371.400.000,00	69.600.000,00	-301.800.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.598.657.000,00	1.188.788.000,00	-409.869.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.085.094.400,00	664.125.000,00	-420.969.400,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	526.000.000,00	357.400.000,00	-168.600.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	191.600.000,00	97.125.000,00	-94.475.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	265.443.400,00	125.000.000,00	-140.443.400,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	102.051.000,00	84.600.000,00	-17.451.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	148.450.000,00	292.000.000,00	143.550.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	117.000.000,00	292.000.000,00	175.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	254.137.600,00	131.863.000,00	-122.274.600,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.769.000,00	11.700.000,00	-11.069.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	159.903.000,00	100.813.000,00	-59.090.000,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.850.000,00	19.350.000,00	4.500.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	110.975.000,00	100.800.000,00	-10.175.000,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	107.225.000,00	100.800.000,00	-6.425.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.154.117.700,00	755.000.000,00	-399.117.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	386.372.400,00	35.600.000,00	-350.772.400,00	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.300,00	26.000.000,00	-274.000.300,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	767.745.300,00	719.400.000,00	-48.345.300,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	359.700.000,00	392.400.000,00	32.700.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.931.301.142,00	12.384.539.632,00	-4.546.761.510,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	16.931.301.142,00	12.384.539.632,00	-4.546.761.510,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.104.025.800,00	5.993.498.700,00	-2.110.527.100,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.266.515.700,00	4.953.299.800,00	-1.313.215.900,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000,00	1.700.853.000,00	-418.209.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700,00	3.252.446.800,00	-895.006.900,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	120.390.100,00	86.707.400,00	-33.682.700,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100,00	86.707.400,00	-33.682.700,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	17.151.900,00	17.151.900,00	0,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900,00	17.151.900,00	0,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	662.920.200,00	107.154.000,00	-555.766.200,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000,00	107.154.000,00	-14.827.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	421.953.300,00	329.314.900,00	-92.638.400,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000,00	24.133.000,00	-17.350.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000,00	78.375.000,00	-9.931.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400,00	187.838.000,00	-24.124.400,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900,00	38.968.900,00	-41.233.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	524.592.800,00	440.418.800,00	-84.174.000,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000,00	10.688.000,00	-7.222.000,00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	506.682.800,00	429.730.800,00	-76.952.000,00	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.245.300,00	8.208.300,00	-20.037.000,00	
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300,00	8.208.300,00	-20.037.000,00	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.256.500,00	51.243.600,00	-11.012.900,00	
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000,00	29.634.400,00	-115.600,00	
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500,00	21.609.200,00	-10.897.300,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.037.623.200,00	433.327.200,00	-604.296.000,00	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	937.623.200,00	333.327.200,00	-604.296.000,00	
2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000,00	16.750.000,00	-20.820.000,00	
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200,00	316.577.200,00	-483.476.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.789.652.142,00	5.957.713.732,00	-1.831.938.410,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.988.600,00	5.049.100,00	-1.939.500,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.988.600,00	5.049.100,00	-1.939.500,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.487.702.042,00	3.978.161.032,00	-1.509.541.010,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.487.702.042,00	3.978.161.032,00	-1.509.541.010,00	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.070.000,00	2.790.700,00	-1.279.300,00	
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.070.000,00	2.790.700,00	-1.279.300,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.000.000,00	21.000.000,00	-40.000.000,00	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.000.000,00	15.500.000,00	-15.500.000,00	
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	5.500.000,00	-24.500.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.676.600,00	352.807.700,00	-355.868.900,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.132.400,00	3.725.000,00	-4.407.400,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.975.800,00	34.832.200,00	-10.143.600,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.234.400,00	29.720.500,00	-19.513.900,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.710.100,00	20.510.100,00	-2.200.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.652.200,00	44.238.800,00	-11.413.400,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27.971.700,00	19.781.100,00	-8.190.600,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.817.200,00	1.399.025.200,00	674.208.000,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	3.200.000,00	-5.200.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.920.000,00	100.920.000,00	-6.000.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	609.497.200,00	1.294.905.200,00	685.408.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.308.000,00	198.880.000,00	-502.428.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	42.000.000,00	-2.010.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.010.000,00	108.390.000,00	-319.620.000,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.350.000,00	14.490.000,00	-14.860.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.938.000,00	34.000.000,00	-165.938.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.547.896.826,00	8.955.023.742,00	-3.592.873.084,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12.547.896.826,00	8.955.023.742,00	-3.592.873.084,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	682.073.200,00	285.697.300,00	-396.375.900,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	682.073.200,00	285.697.300,00	-396.375.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	57.490.000,00	12.320.000,00	-45.170.000,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	110.000.000,00	58.522.500,00	-51.477.500,00	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	64.600.000,00	5.400.000,00	-59.200.000,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	199.992.700,00	87.221.000,00	-112.771.700,00	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	249.990.500,00	122.233.800,00	-127.756.700,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.985.423.950,00	1.877.397.750,00	-1.108.026.200,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.363.650,00	27.363.650,00	0,00	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650,00	27.363.650,00	0,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.958.060.300,00	1.850.034.100,00	-1.108.026.200,00	
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	49.492.900,00	7.190.000,00	-42.302.900,00	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	405.196.600,00	127.500.000,00	-277.696.600,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.146.991.800,00	616.866.100,00	-530.125.700,00	
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	79.551.000,00	5.650.000,00	-73.901.000,00	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.092.828.000,00	1.092.828.000,00	0,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.880.399.676,00	6.791.928.692,00	-2.088.470.984,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.559.540.076,00	5.665.051.792,00	-894.488.284,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.559.540.076,00	5.665.051.792,00	-894.488.284,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.748.100,00	230.259.400,00	-375.488.700,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.259.300,00	9.514.900,00	-8.744.400,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.513.400,00	56.909.000,00	-21.604.400,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.413.000,00	36.833.500,00	-33.579.500,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.562.400,00	27.002.000,00	-11.560.400,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	805.622.400,00	3.995.000,00	-801.627.400,00	
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	361.458.500,00	3.995.000,00	-357.463.500,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.385.100,00	652.998.500,00	214.613.400,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.000.000,00	198.780.000,00	-36.220.000,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.385.100,00	453.218.500,00	259.833.400,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.104.000,00	239.624.000,00	-181.480.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.994.000,00	179.024.000,00	-103.970.000,00	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.840.000,00	40.600.000,00	-29.240.000,00	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	923.579.400,00	32.460.700,00	-891.118.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	923.579.400,00	32.460.700,00	-891.118.700,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	273.318.800,00	32.460.700,00	-240.858.100,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	273.318.800,00	32.460.700,00	-240.858.100,00	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000,00	32.460.700,00	-539.300,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.838.314.066,00	5.490.389.160,00	-2.347.924.906,00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.838.314.066,00	5.490.389.160,00	-2.347.924.906,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	97.025.700,00	19.841.000,00	-77.184.700,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.329.500,00	7.225.000,00	-25.104.500,00	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.329.500,00	7.225.000,00	-25.104.500,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	64.696.200,00	12.616.000,00	-52.080.200,00	
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.696.200,00	12.616.000,00	-52.080.200,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	189.397.000,00	41.125.000,00	-148.272.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	189.397.000,00	41.125.000,00	-148.272.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.397.000,00	41.125.000,00	-148.272.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	468.939.600,00	44.852.700,00	-424.086.900,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	468.939.600,00	44.852.700,00	-424.086.900,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600,00	26.615.200,00	-411.694.400,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000,00	18.237.500,00	-12.392.500,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	686.483.100,00	38.979.000,00	-647.504.100,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	686.483.100,00	38.979.000,00	-647.504.100,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000,00	7.104.000,00	-90.514.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000,00	31.875.000,00	-153.366.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.380.522.066,00	5.345.591.460,00	-1.034.930.606,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.570.325.966,00	3.865.416.560,00	-704.909.406,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.570.325.966,00	3.865.416.560,00	-704.909.406,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.502.100,00	341.215.000,00	-196.287.100,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.338.800,00	15.338.800,00	0,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.999.900,00	75.453.700,00	-24.546.200,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.398.000,00	29.808.400,00	-1.589.600,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.944.400,00	29.476.600,00	-7.467.800,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.846.000,00	36.162.500,00	-12.683.500,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.154.200,00	132.021.900,00	-114.132.300,00	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.154.200,00	132.021.900,00	-114.132.300,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.017.200,00	819.260.000,00	298.242.800,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.020.000,00	176.420.000,00	-39.600.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.997.200,00	642.840.000,00	337.842.800,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.422.000,00	187.678.000,00	-272.744.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.310.000,00	112.410.000,00	-49.900.000,00	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.932.000,00	52.088.000,00	-222.844.000,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.274.689.529,00	14.419.494.796,00	-3.855.194.733,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.274.689.529,00	14.419.494.796,00	-3.855.194.733,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	966.486.800,00	816.261.100,00	-150.225.700,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	464.063.900,00	381.176.200,00	-82.887.700,00	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	115.904.400,00	77.604.400,00	-38.300.000,00	
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	44.987.600,00	44.987.600,00	0,00	
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	289.610.400,00	245.022.700,00	-44.587.700,00	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	13.561.500,00	13.561.500,00	0,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	502.422.900,00	435.084.900,00	-67.338.000,00	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	424.232.200,00	356.894.200,00	-67.338.000,00	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	78.190.700,00	78.190.700,00	0,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.720.714.005,00	6.136.793.440,00	-1.583.920.565,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.647.352.365,00	1.640.911.100,00	-6.441.265,00	
2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	37.631.800,00	37.631.800,00	0,00	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.276.987.465,00	1.270.546.200,00	-6.441.265,00	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	332.733.100,00	332.733.100,00	0,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.606.724.240,00	1.556.000.240,00	-50.724.000,00	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.115.728.000,00	1.065.004.000,00	-50.724.000,00	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	490.996.240,00	490.996.240,00	0,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.147.194.600,00	835.427.600,00	-311.767.000,00	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	49.550.000,00	12.820.000,00	-36.730.000,00	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	280.759.100,00	280.759.100,00	0,00	
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	703.805.500,00	505.553.500,00	-198.252.000,00	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	113.080.000,00	36.295.000,00	-76.785.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.537.515.000,00	1.377.843.000,00	-1.159.672.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	2.500.000.000,00	1.367.640.000,00	-1.132.360.000,00	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	37.515.000,00	10.203.000,00	-27.312.000,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	781.927.800,00	726.611.500,00	-55.316.300,00	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	46.600.500,00	39.068.100,00	-7.532.400,00	
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	226.950.800,00	224.950.800,00	-2.000.000,00	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	477.595.000,00	462.592.600,00	-15.002.400,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	274.397.200,00	232.717.700,00	-41.679.500,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	274.397.200,00	232.717.700,00	-41.679.500,00	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.283.600,00	50.283.600,00	0,00	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	99.199.000,00	81.039.000,00	-18.160.000,00	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	124.914.600,00	101.395.100,00	-23.519.500,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.313.091.524,00	7.233.722.556,00	-2.079.368.968,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.234.000,00	15.109.000,00	-6.125.000,00	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.234.000,00	15.109.000,00	-6.125.000,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.597.419.274,00	4.281.439.456,00	-1.315.979.818,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.597.419.274,00	4.281.439.456,00	-1.315.979.818,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.926.700,00	386.857.900,00	-256.068.800,00	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.984.000,00	24.984.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.428.000,00	83.428.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.367.500,00	38.354.800,00	7.987.300,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.972.100,00	19.821.500,00	-30.150.600,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	18.094.500,00	-8.905.500,00	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.175.100,00	127.175.100,00	0,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.138.000,00	1.815.781.200,00	943.643.200,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.720.000,00	249.720.000,00	0,00	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.900.400,00	43.900.400,00	0,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	578.517.600,00	1.522.160.800,00	943.643.200,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.859.705.150,00	734.535.000,00	-1.125.170.150,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.360.000,00	121.460.000,00	-105.900.000,00	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.372.000,00	76.372.000,00	0,00	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.120.000,00	164.968.000,00	-21.152.000,00	
2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.369.853.150,00	371.735.000,00	-998.118.150,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	364.194.900,00	68.738.500,00	-295.456.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	364.194.900,00	68.738.500,00	-295.456.400,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	364.194.900,00	68.738.500,00	-295.456.400,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	364.194.900,00	68.738.500,00	-295.456.400,00	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	172.167.300,00	68.738.500,00	-103.428.800,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	237.595.300,00	79.886.000,00	-157.709.300,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	237.595.300,00	79.886.000,00	-157.709.300,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	237.595.300,00	79.886.000,00	-157.709.300,00	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.578.000,00	12.093.000,00	-37.485.000,00	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.881.800,00	67.793.000,00	-79.088.800,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.144.775.408,00	7.620.376.612,00	-1.524.398.796,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.144.775.408,00	7.620.376.612,00	-1.524.398.796,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	628.800.400,00	628.691.800,00	-108.600,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	353.928.000,00	353.836.800,00	-91.200,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000,00	353.836.800,00	-91.200,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.681.400,00	253.664.000,00	-17.400,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400,00	253.664.000,00	-17.400,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.191.000,00	21.191.000,00	0,00	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000,00	21.191.000,00	0,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	49.979.100,00	49.944.000,00	-35.100,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	49.979.100,00	49.944.000,00	-35.100,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100,00	49.944.000,00	-35.100,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	183.736.300,00	118.801.500,00	-64.934.800,00	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	183.736.300,00	118.801.500,00	-64.934.800,00	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300,00	118.801.500,00	-64.934.800,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.282.259.608,00	6.822.939.312,00	-1.459.320.296,00	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.802.116.508,00	3.946.244.212,00	-855.872.296,00	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.802.116.508,00	3.946.244.212,00	-855.872.296,00	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.998.000,00	540.831.600,00	-255.166.400,00	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.700,00	24.999.700,00	0,00	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.999.000,00	88.487.000,00	-1.512.000,00	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.999.700,00	49.964.300,00	-1.035.400,00	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	89.985.000,00	-15.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.999.600,00	37.395.600,00	-2.604.000,00	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.036.282.000,00	1.998.325.500,00	-37.956.500,00	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.800.000,00	170.900.000,00	-39.900.000,00	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.825.482.000,00	1.827.425.500,00	1.943.500,00	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.563.000,00	334.038.000,00	-113.525.000,00	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.680.000,00	35.330.000,00	-3.350.000,00	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.970.000,00	163.910.000,00	-80.060.000,00	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.925.000,00	59.840.000,00	-85.000,00	
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.988.000,00	74.958.000,00	-30.030.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.739.866.250,00	5.911.327.062,00	171.460.812,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.739.866.250,00	5.911.327.062,00	171.460.812,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	258.734.200,00	739.689.000,00	480.954.800,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.951.700,00	139.158.000,00	-33.793.700,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.991.000,00	52.714.000,00	-22.277.000,00	
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	9.865.600,00	9.865.600,00	
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	19.985.700,00	8.843.100,00	-11.142.600,00	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	0,00	56.199.300,00	56.199.300,00	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	40.460.000,00	11.536.000,00	-28.924.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.782.500,00	600.531.000,00	514.748.500,00	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.984.800,00	17.914.800,00	-70.000,00	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	13.984.400,00	13.984.400,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	67.797.700,00	568.631.800,00	500.834.100,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11.436.600,00	53.939.800,00	42.503.200,00	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	11.436.600,00	53.939.800,00	42.503.200,00	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0,00	53.939.800,00	53.939.800,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.469.695.450,00	5.117.698.262,00	-351.997.188,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.603.895.350,00	4.240.293.112,00	-363.602.238,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.603.895.350,00	4.240.293.112,00	-363.602.238,00	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000,00	4.500.000,00	-21.500.000,00	
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.000.000,00	4.500.000,00	-21.500.000,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.685.900,00	152.899.600,00	-145.786.300,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.051.400,00	4.064.700,00	-3.986.700,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.270.500,00	22.335.300,00	-11.935.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.084.100,00	8.922.100,00	-9.162.000,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.523.600,00	13.077.500,00	-9.446.100,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.756.300,00	4.500.000,00	-11.256.300,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.622.600,00	42.544.200,00	3.921.600,00	
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.622.600,00	42.544.200,00	3.921.600,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.481.600,00	584.601.350,00	263.119.750,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.260.000,00	1.254.000,00	-2.006.000,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.400.000,00	115.450.000,00	-15.950.000,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.821.600,00	467.897.350,00	281.075.750,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.010.000,00	92.860.000,00	-88.150.000,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.010.000,00	38.250.000,00	-3.760.000,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.830.000,00	40.130.000,00	-84.700.000,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.170.000,00	14.480.000,00	310.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	515.272.900,00	163.054.900,00	-352.218.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	219.202.900,00	79.537.900,00	-139.665.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	71.786.000,00	34.182.000,00	-37.604.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	21.906.000,00	15.806.000,00	-6.100.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	49.880.000,00	18.376.000,00	-31.504.000,00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	34.794.000,00	16.984.400,00	-17.809.600,00	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	34.794.000,00	16.984.400,00	-17.809.600,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	112.622.900,00	28.371.500,00	-84.251.400,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	72.501.400,00	12.250.000,00	-60.251.400,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	40.121.500,00	16.121.500,00	-24.000.000,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	296.070.000,00	83.517.000,00	-212.553.000,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	23.256.000,00	11.084.000,00	-12.172.000,00	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	23.256.000,00	11.084.000,00	-12.172.000,00	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	9.914.000,00	4.867.000,00	-5.047.000,00	
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	9.914.000,00	4.867.000,00	-5.047.000,00	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	262.900.000,00	67.566.000,00	-195.334.000,00	
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	262.900.000,00	67.566.000,00	-195.334.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.257.764.150,00	10.260.151.250,00	-6.997.612.900,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	17.257.764.150,00	10.260.151.250,00	-6.997.612.900,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.201.380.600,00	2.039.609.200,00	-2.161.771.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.760.908.700,00	1.979.242.700,00	-1.781.666.000,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.297.000,00	1.779.542.700,00	-1.636.754.300,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	420.488.400,00	53.985.000,00	-366.503.400,00	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600,00	53.985.000,00	-142.830.600,00	
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.983.500,00	6.381.500,00	-13.602.000,00	
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500,00	6.381.500,00	-13.602.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.880.595.000,00	987.366.200,00	-1.893.228.800,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	201.321.300,00	29.280.200,00	-172.041.100,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.000.100,00	7.627.800,00	-82.372.300,00	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.321.200,00	21.652.400,00	-89.668.800,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.648.804.900,00	958.086.000,00	-1.690.718.900,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	624.542.900,00	269.994.200,00	-354.548.700,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.941.508.400,00	688.091.800,00	-1.253.416.600,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	112.774.300,00	36.040.000,00	-76.734.300,00	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	112.774.300,00	36.040.000,00	-76.734.300,00	
3.25.05.2.01.0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600,00	36.040.000,00	-26.755.600,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.224.190.200,00	579.051.400,00	-645.138.800,00	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	270.165.500,00	9.196.000,00	-260.969.500,00	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	270.165.500,00	9.196.000,00	-260.969.500,00	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128.093.700,00	31.260.300,00	-96.833.400,00	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	128.093.700,00	31.260.300,00	-96.833.400,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	825.931.000,00	538.595.100,00	-287.335.900,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	237.555.900,00	217.633.100,00	-19.922.800,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	588.375.100,00	320.962.000,00	-267.413.100,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.838.824.050,00	6.618.084.450,00	-2.220.739.600,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.110.501.750,00	4.914.131.750,00	-1.196.370.000,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.110.501.750,00	4.914.131.750,00	-1.196.370.000,00	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.500.000,00	66.000.000,00	-80.500.000,00	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000,00	30.000.000,00	-35.000.000,00	
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.500.000,00	36.000.000,00	-45.500.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.353.300,00	420.472.700,00	-342.880.600,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.162.200,00	20.468.800,00	-20.693.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.502.200,00	79.862.600,00	-8.639.600,00	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.419.700,00	13.698.000,00	-13.721.700,00	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.173.200,00	47.896.100,00	-78.277.100,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.866.000,00	51.985.200,00	-14.880.800,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.230.000,00	6.562.000,00	-6.668.000,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.608.000,00	905.100.000,00	300.492.000,00	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.296.800,00	14.100.000,00	-21.196.800,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.711.200,00	617.400.000,00	321.688.800,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.020.000,00	312.380.000,00	-528.640.000,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.940.000,00	126.820.000,00	-287.120.000,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.910.000,00	35.810.000,00	-6.100.000,00	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.870.000,00	109.500.000,00	-25.370.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.318.703.900,00	1.251.546.000,00	-5.067.157.900,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.318.703.900,00	1.251.546.000,00	-5.067.157.900,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.747.925.500,00	581.005.400,00	-3.166.920.100,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.088.863.100,00	522.705.800,00	-1.566.157.300,00	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	891.540.000,00	28.173.200,00	-863.366.800,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	699.922.600,00	454.542.100,00	-245.380.500,00	
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500,00	39.990.500,00	0,00	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	103.999.700,00	58.299.600,00	-45.700.100,00	
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700,00	24.638.400,00	-35.361.300,00	
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000,00	33.661.200,00	-10.338.800,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.339.120.000,00	670.540.600,00	-668.579.400,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.339.120.000,00	670.540.600,00	-668.579.400,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	889.666.000,00	425.680.000,00	-463.986.000,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	449.454.000,00	244.860.600,00	-204.593.400,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.150.394.362,00	13.180.616.882,00	-3.969.777.480,00	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	17.150.394.362,00	13.180.616.882,00	-3.969.777.480,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.221.313.330,00	1.152.120.400,00	-1.069.192.930,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.895.377.930,00	846.150.400,00	-1.049.227.530,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.377.930,00	846.150.400,00	-1.049.227.530,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000,00	305.970.000,00	-30.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000,00	305.970.000,00	-30.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	805.493.000,00	400.924.000,00	-404.569.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	400.924.000,00	400.924.000,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0,00	400.924.000,00	400.924.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	477.992.850,00	262.226.200,00	-215.766.650,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	422.993.000,00	262.226.200,00	-160.766.800,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.000,00	262.226.200,00	-160.766.800,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	64.998.200,00	49.511.800,00	-15.486.400,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	64.998.200,00	49.511.800,00	-15.486.400,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200,00	49.511.800,00	-15.486.400,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	636.395.800,00	172.710.000,00	-463.685.800,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	636.395.800,00	172.710.000,00	-463.685.800,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	209.929.400,00	6.300.000,00	-203.629.400,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.181.700,00	2.250.000,00	-290.931.700,00	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	164.160.000,00	164.160.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.844.201.182,00	11.143.124.482,00	-1.701.076.700,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.727.400,00	13.977.400,00	-15.750.000,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.727.400,00	13.977.400,00	-15.750.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.598.738.282,00	10.025.344.982,00	-573.393.300,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.598.738.282,00	10.025.344.982,00	-573.393.300,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.200.000,00	6.560.000,00	-112.640.000,00	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.700.000,00	6.560.000,00	-43.140.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.335.600,00	332.030.800,00	-297.304.800,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.755.000,00	12.033.000,00	-4.722.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.197.500,00	69.705.200,00	-25.492.300,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.142.500,00	40.252.700,00	-26.889.800,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.796.800,00	26.646.300,00	-31.150.500,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.962.600,00	30.104.400,00	-8.858.200,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.481.200,00	3.289.200,00	-192.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	150.000.000,00	-200.000.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.342.300,00	7.105.400,00	-280.236.900,00	
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.049.500,00	7.105.400,00	-35.944.100,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.317.600,00	600.430.000,00	-142.887.600,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,00	1.300.000,00	-1.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.560.000,00	136.860.000,00	-8.700.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.557.600,00	462.270.000,00	-127.287.600,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.540.000,00	157.675.900,00	-278.864.100,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.180.000,00	83.185.900,00	-191.994.100,00	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.920.000,00	31.630.000,00	-17.290.000,00	
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.080.000,00	2.610.000,00	-16.470.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.749.148.708,00	5.749.897.182,00	-3.999.251.526,00	
3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.749.148.708,00	5.749.897.182,00	-3.999.251.526,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.587.964.200,00	820.664.300,00	-767.299.900,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200,00	820.664.300,00	-767.299.900,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200,00	820.664.300,00	-767.299.900,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	646.701.900,00	55.239.000,00	-591.462.900,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	589.925.300,00	55.239.000,00	-534.686.300,00	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000,00	30.200.000,00	-7.500.000,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	552.225.300,00	25.039.000,00	-527.186.300,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.556.600,00	65.582.600,00	-98.974.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.556.600,00	65.582.600,00	-98.974.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800,00	61.380.500,00	-85.679.300,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800,00	4.202.100,00	-13.294.700,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.349.926.008,00	4.808.411.282,00	-2.541.514.726,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.558.140.508,00	3.846.418.982,00	-1.711.721.526,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.558.140.508,00	3.846.418.982,00	-1.711.721.526,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.692.400,00	212.216.900,00	-522.475.500,00	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.014.500,00	4.670.200,00	-20.344.300,00	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.899.000,00	52.439.100,00	-105.459.900,00	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.950.900,00	18.074.300,00	-42.876.600,00	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.974.000,00	37.255.200,00	-26.718.800,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.386.000,00	24.778.100,00	-47.607.900,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.608.800,00	543.610.400,00	102.001.600,00	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000,00	2.000.000,00	-7.600.000,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.320.000,00	100.200.000,00	-28.120.000,00	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.688.800,00	441.410.400,00	137.721.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.027.000,00	206.165.000,00	-177.862.000,00	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.995.000,00	197.395.000,00	-56.600.000,00	
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.460.000,00	8.770.000,00	-23.690.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	650.471.500,00	68.735.100,00	-581.736.400,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	616.165.600,00	68.735.100,00	-547.430.500,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	616.165.600,00	68.735.100,00	-547.430.500,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700,00	13.927.600,00	-64.839.100,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900,00	54.807.500,00	-444.784.400,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	49.846.171.886,00	35.852.573.982,00	-13.993.597.904,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	49.846.171.886,00	35.852.573.982,00	-13.993.597.904,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.822.770.300,00	7.834.254.100,00	-3.988.516.200,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	292.346.400,00	117.049.000,00	-175.297.400,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	236.930.200,00	98.761.000,00	-138.169.200,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200,00	9.288.000,00	-16.878.200,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000,00	9.000.000,00	-20.250.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.899.082.800,00	7.379.761.100,00	-3.519.321.700,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800,00	6.532.827.600,00	-2.654.025.200,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000,00	21.390.000,00	-67.840.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000,00	825.543.500,00	-797.456.500,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	516.347.900,00	292.459.000,00	-223.888.900,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	140.668.000,00	83.476.000,00	-57.192.000,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	168.024.000,00	57.294.000,00	-110.730.000,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	207.655.900,00	151.689.000,00	-55.966.900,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	114.993.200,00	44.985.000,00	-70.008.200,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300,00	37.495.000,00	-62.503.300,00	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900,00	7.490.000,00	-7.504.900,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.459.918.000,00	552.249.300,00	-907.668.700,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	249.848.500,00	88.637.200,00	-161.211.300,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000,00	39.425.600,00	-60.574.400,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.536.000,00	44.711.600,00	-55.824.400,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.312.500,00	4.500.000,00	-44.812.500,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	121.159.500,00	63.066.800,00	-58.092.700,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.847.500,00	43.762.800,00	-8.084.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	69.312.000,00	19.304.000,00	-50.008.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.032.695.000,00	391.452.500,00	-641.242.500,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	364.929.000,00	136.382.400,00	-228.546.600,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	285.077.000,00	152.602.400,00	-132.474.600,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	382.689.000,00	102.467.700,00	-280.221.300,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	56.215.000,00	9.092.800,00	-47.122.200,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	28.500.000,00	9.092.800,00	-19.407.200,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.563.483.586,00	27.466.070.582,00	-9.097.413.004,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.930.800,00	36.721.800,00	-43.209.000,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.930.800,00	36.721.800,00	-43.209.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.065.505.192,00	17.148.763.332,00	-4.916.741.860,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.997.659.892,00	17.111.604.232,00	-4.886.055.660,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.845.300,00	24.207.500,00	-18.637.800,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	12.951.600,00	-12.048.400,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.587.100,00	10.335.100,00	-26.252.000,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.587.100,00	10.335.100,00	-26.252.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284.228.800,00	30.500.000,00	-253.728.800,00	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	249.296.800,00	30.500.000,00	-218.796.800,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.247.247.800,00	1.104.364.300,00	-1.142.883.500,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.979.200,00	119.742.300,00	-30.236.900,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	761.222.600,00	366.827.000,00	-394.395.600,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.372.000,00	12.820.000,00	-128.552.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	144.674.000,00	4.975.000,00	-139.699.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.050.000.000,00	600.000.000,00	-450.000.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.782.831.000,00	4.032.675.500,00	1.249.844.500,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.003.800.000,00	834.170.000,00	-169.630.000,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.995.000,00	109.285.500,00	-84.709.500,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.585.036.000,00	3.089.220.000,00	1.504.184.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.681.805.900,00	1.989.431.100,00	-1.692.374.800,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	634.194.300,00	457.590.000,00	-176.604.300,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.809.671.600,00	1.014.586.100,00	-795.085.500,00	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	11.200.000,00	-8.800.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	618.060.000,00	395.220.000,00	-222.840.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.880.000,00	110.835.000,00	-489.045.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.244.914.594,00	1.187.031.250,00	-57.883.344,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	591.207.994,00	574.894.000,00	-16.313.994,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	213.706.600,00	172.137.250,00	-41.569.350,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.269.060.700,00	1.324.756.500,00	-944.304.200,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	338.931.600,00	224.267.800,00	-114.663.800,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	338.453.800,00	215.591.700,00	-122.862.100,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.591.675.300,00	884.897.000,00	-706.778.300,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	410.944.600,00	177.938.500,00	-233.006.100,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107.902.900,00	39.616.000,00	-68.286.900,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	128.744.400,00	59.037.300,00	-69.707.100,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	115.223.400,00	41.679.800,00	-73.543.600,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.073.900,00	37.605.400,00	-21.468.500,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.199.698.100,00	423.553.200,00	-776.144.900,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	601.032.200,00	214.620.500,00	-386.411.700,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	404.310.300,00	98.980.400,00	-305.329.900,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	194.355.600,00	109.952.300,00	-84.403.300,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	47.163.612.810,00	35.908.418.608,00	-11.255.194.202,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	47.163.612.810,00	35.908.418.608,00	-11.255.194.202,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.719.250.300,00	13.100.181.100,00	-8.619.069.200,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.360.310.000,00	973.089.900,00	-1.387.220.100,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	883.092.800,00	-1.116.907.200,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	90.000.000,00	89.997.100,00	-2.900,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	111.451.000,00	111.451.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	20.436.000,00	20.436.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.436.000,00	20.436.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	30.171.000,00	30.171.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	20.436.000,00	20.436.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	9.436.000,00	9.436.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10.536.000,00	10.536.000,00	0,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	11.188.702.000,00	8.209.791.000,00	-2.978.911.000,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.076.616.000,00	2.576.616.000,00	-500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.597.744.000,00	2.680.744.000,00	-917.000.000,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.049.154.000,00	2.749.154.000,00	-300.000.000,00	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	133.026.000,00	33.026.000,00	-100.000.000,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	699.054.000,00	169.054.000,00	-530.000.000,00	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	633.108.000,00	1.197.000,00	-631.911.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.765.000.000,00	1.148.840.000,00	-616.160.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	750.000.000,00	500.000.000,00	-250.000.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	419.300.000,00	150.000.000,00	-269.300.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.700.000,00	25.530.000,00	-70.170.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000,00	203.310.000,00	-16.690.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	470.000.000,00	570.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	470.000.000,00	570.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.823.787.300,00	2.087.009.200,00	-3.736.778.100,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.710.097.300,00	1.969.255.200,00	-3.740.842.100,00	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.000.000,00	24.064.000,00	4.064.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	93.690.000,00	93.690.000,00	0,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.444.362.510,00	22.808.237.508,00	-2.636.125.002,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.158.594,00	3.858.270.208,00	-1.659.888.386,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.511.924.594,00	3.852.036.208,00	-1.659.888.386,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	564.400.000,00	532.062.000,00	-32.338.000,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.900.000,00	62.562.000,00	22.662.000,00	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.500.000,00	77.500.000,00	-62.000.000,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	385.000.000,00	392.000.000,00	7.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.630.383.500,00	1.665.667.500,00	35.284.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.900,00	49.998.900,00	0,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	511.809.300,00	545.589.300,00	33.780.000,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.982.200,00	56.982.200,00	0,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	436.028.000,00	413.755.500,00	-22.272.500,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.272.700,00	155.272.700,00	0,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.994.300,00	53.770.000,00	-6.224.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.298.900,00	40.298.900,00	0,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.548.321.660,00	43.283.500,00	-1.505.038.160,00	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.918.600,00	43.283.500,00	-205.635.100,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.100.000,00	1.664.180.000,00	832.080.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.100.000,00	1.326.680.000,00	839.580.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.372.214.456,00	964.690.000,00	-407.524.456,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.050.000,00	225.860.000,00	-211.190.000,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.968.000,00	116.808.000,00	-45.160.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	529.304.456,00	419.862.000,00	-109.442.456,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.882.000,00	161.910.000,00	-37.972.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.858.337.000,00	13.959.637.000,00	101.300.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.281.087.000,00	13.320.887.000,00	39.800.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	263.750.000,00	326.250.000,00	62.500.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	313.500.000,00	312.500.000,00	-1.000.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	120.447.300,00	120.447.300,00	0,00	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	30.492.100,00	30.492.100,00	0,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	79.960.200,00	79.960.200,00	0,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	9.773.355.016,00	6.610.114.416,00	-3.163.240.600,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.773.355.016,00	6.610.114.416,00	-3.163.240.600,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	703.495.500,00	299.939.100,00	-403.556.400,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	603.498.200,00	293.057.400,00	-310.440.800,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200,00	2.485.200,00	-17.850.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300,00	6.784.100,00	-198.457.200,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000,00	320.000,00	-5.200.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	372.401.700,00	283.468.100,00	-88.933.600,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	99.997.300,00	6.881.700,00	-93.115.600,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	99.997.300,00	6.881.700,00	-93.115.600,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.447.423.400,00	188.250.500,00	-1.259.172.900,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	532.038.300,00	83.952.700,00	-448.085.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.061.200,00	8.179.600,00	-52.881.600,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.503.800,00	7.163.200,00	-37.340.600,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500,00	4.223.200,00	-25.153.300,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	81.093.600,00	2.593.200,00	-78.500.400,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400,00	7.619.200,00	-111.744.200,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600,00	10.131.600,00	-50.613.000,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.649.900,00	4.083.900,00	-31.566.000,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.245.300,00	39.958.800,00	-60.286.500,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	484.025.200,00	62.767.400,00	-421.257.800,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800,00	5.334.600,00	-57.597.200,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400,00	1.978.200,00	-26.978.200,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400,00	6.528.200,00	-28.778.200,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400,00	2.798.200,00	-88.666.200,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500,00	8.268.600,00	-91.161.900,00	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.956.400,00	1.978.200,00	-26.978.200,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400,00	3.903.200,00	-35.903.200,00	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.172.900,00	31.978.200,00	-65.194.700,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	431.359.900,00	41.530.400,00	-389.829.500,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600,00	17.061.600,00	-51.978.000,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400,00	1.978.200,00	-27.878.200,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400,00	4.413.200,00	-34.933.200,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300,00	1.978.200,00	-94.394.100,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.294.800,00	7.845.600,00	-47.449.200,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200,00	1.830.200,00	-46.128.000,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.718.200,00	4.593.200,00	-29.125.000,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000,00	1.830.200,00	-57.943.800,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.622.436.116,00	6.121.924.816,00	-1.500.511.300,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	916.400,00	916.000,00	-400,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	916.400,00	916.000,00	-400,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.979.481.016,00	5.107.450.216,00	-872.030.800,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.975.988.016,00	5.103.957.216,00	-872.030.800,00	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.493.000,00	3.493.000,00	0,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.682.000,00	42.500.000,00	-191.182.000,00	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.682.000,00	42.500.000,00	-191.182.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.836.600,00	383.054.100,00	-319.782.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.355.600,00	13.355.500,00	-100,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.656.400,00	28.854.100,00	-4.802.300,00	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.044.200,00	29.082.400,00	-28.961.800,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.140.500,00	90.122.900,00	14.982.400,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.639.400,00	21.639.200,00	-200,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.720.700,00	35.841.300,00	-137.879.400,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.720.700,00	35.841.300,00	-137.879.400,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.089.400,00	388.603.200,00	213.513.800,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.349.400,00	6.393.200,00	-13.956.200,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	123.000.000,00	-9.000.000,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.740.000,00	259.210.000,00	236.470.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.710.000,00	163.560.000,00	-193.150.000,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.950.000,00	76.590.000,00	-75.360.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.700.000,00	19.720.000,00	-78.980.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.050.000,00	27.000.000,00	-35.050.000,00	
5.02	KEUANGAN	122.480.545.603,00	108.844.874.461,00	-13.635.671.142,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	122.480.545.603,00	108.844.874.461,00	-13.635.671.142,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	106.960.594.250,00	96.156.333.250,00	-10.804.261.000,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	792.923.000,00	346.361.000,00	-446.562.000,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100,00	26.797.600,00	-30.394.500,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700,00	23.792.000,00	-31.031.700,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	130.673.500,00	65.585.500,00	-65.088.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.588.800,00	75.302.300,00	-114.286.500,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900,00	51.273.600,00	-60.943.300,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400,00	46.296.100,00	-57.786.300,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400,00	57.313.900,00	-77.723.500,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	599.341.600,00	247.161.000,00	-352.180.600,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200,00	104.484.500,00	-165.978.700,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000,00	18.416.800,00	-18.754.200,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400,00	56.545.700,00	-82.683.700,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	119.122.000,00	55.372.700,00	-63.749.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000,00	12.341.300,00	-21.014.700,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	577.497.700,00	235.490.500,00	-342.007.200,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.262.000,00	30.000.000,00	-56.262.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400,00	32.277.600,00	-9.752.800,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700,00	38.709.400,00	-121.290.300,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	76.352.900,00	31.895.600,00	-44.457.300,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400,00	61.071.000,00	-17.222.400,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900,00	35.293.400,00	-68.562.500,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.703.400,00	6.243.500,00	-24.459.900,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	104.990.831.950,00	95.327.320.750,00	-9.663.511.200,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.200,00	87.501.904.000,00	-9.591.039.200,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750,00	6.825.416.750,00	0,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	699.931.200,00	349.692.000,00	-350.239.200,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	699.931.200,00	349.692.000,00	-350.239.200,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	97.148.400,00	77.072.000,00	-20.076.400,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200,00	27.317.000,00	-31.698.200,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900,00	36.717.500,00	-31.037.400,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600,00	92.946.300,00	-135.576.300,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400,00	114.639.200,00	-108.312.200,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700,00	1.000.000,00	-23.538.700,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.041.091.000,00	1.186.054.400,00	-855.036.600,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.041.091.000,00	1.186.054.400,00	-855.036.600,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000,00	136.550.800,00	-194.449.200,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000,00	44.667.600,00	-24.031.400,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500,00	206.864.100,00	-67.893.400,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000,00	66.013.000,00	-14.847.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000,00	235.325.800,00	-167.450.200,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900,00	18.702.700,00	-7.856.200,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	58.880.800,00	45.048.400,00	-13.832.400,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700,00	432.882.000,00	-157.750.700,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.778.929.153,00	11.152.794.811,00	-1.626.134.342,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.849.400,00	13.779.900,00	-17.069.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.318.000,00	6.998.700,00	-8.319.300,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.531.400,00	6.781.200,00	-8.750.200,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.364.330.573,00	9.845.644.695,00	-518.685.878,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.364.330.573,00	9.845.644.695,00	-518.685.878,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000,00	22.000.000,00	-83.000.000,00	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.000.000,00	22.000.000,00	-29.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	823.468.080,00	389.900.780,00	-433.567.300,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.814.380,00	6.282.980,00	-9.531.400,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.432.400,00	7.647.200,00	-18.785.200,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.114.300,00	26.017.700,00	-9.096.600,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.401.200,00	23.542.100,00	-11.859.100,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.827.800,00	21.290.800,00	-2.537.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.400.000,00	5.120.000,00	-30.280.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.458.300,00	712.089.436,00	309.631.136,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.538.300,00	8.180.900,00	-27.357.400,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.720.000,00	196.980.000,00	-31.740.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	506.928.536,00	386.928.536,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.040.000,00	169.380.000,00	-284.660.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.020.000,00	44.010.000,00	-44.010.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.930.000,00	85.570.000,00	-174.360.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.790.000,00	39.800.000,00	-18.990.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	8.818.906.486,00	6.586.955.730,00	-2.231.950.756,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.818.906.486,00	6.586.955.730,00	-2.231.950.756,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.056.635.700,00	938.059.200,00	-1.118.576.500,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	303.890.600,00	104.790.800,00	-199.099.800,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.979.200,00	3.126.000,00	-6.853.200,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	238.521.800,00	86.943.800,00	-151.578.000,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15.000.000,00	1.221.000,00	-13.779.000,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.389.600,00	13.500.000,00	-26.889.600,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	611.078.900,00	343.603.600,00	-267.475.300,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	24.006.500,00	23.231.500,00	-775.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.258.700,00	22.764.700,00	-176.494.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	387.813.700,00	297.607.400,00	-90.206.300,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.051.349.600,00	489.664.800,00	-561.684.800,00	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	94.647.400,00	60.338.800,00	-34.308.600,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	600.000.000,00	429.326.000,00	-170.674.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.762.270.786,00	5.648.896.530,00	-1.113.374.256,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.409.286,00	4.564.895.730,00	-386.513.556,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.951.409.286,00	4.564.895.730,00	-386.513.556,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.075.000,00	5.500.000,00	-37.575.000,00	
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.075.000,00	5.500.000,00	-37.575.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.864.600,00	164.121.800,00	-582.742.800,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.981.800,00	13.489.600,00	-10.492.200,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.994.600,00	23.719.100,00	-16.275.500,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.987.000,00	22.913.100,00	-52.073.900,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.901.200,00	4.000.000,00	-3.901.200,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.585.000,00	751.869.000,00	109.284.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	1.700.000,00	-2.700.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.840.000,00	188.040.000,00	-1.800.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.345.000,00	562.129.000,00	113.784.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.533.200,00	162.510.000,00	-128.023.200,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.550.000,00	72.710.000,00	-103.840.000,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.973.200,00	49.550.000,00	-20.423.200,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.384.245.000,00	112.443.700,00	-1.271.801.300,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.384.245.000,00	112.443.700,00	-1.271.801.300,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.344.006.800,00	112.443.700,00	-1.231.563.100,00	
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	299.999.100,00	112.443.700,00	-187.555.400,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.371.572.300,00	571.629.400,00	-799.942.900,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.371.572.300,00	571.629.400,00	-799.942.900,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.371.572.300,00	571.629.400,00	-799.942.900,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	103.870.400,00	12.660.000,00	-91.210.400,00	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	103.870.400,00	12.660.000,00	-91.210.400,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	354.778.200,00	172.209.400,00	-182.568.800,00	
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	354.778.200,00	172.209.400,00	-182.568.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	912.923.700,00	386.760.000,00	-526.163.700,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	248.709.000,00	219.889.000,00	-28.820.000,00	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	542.172.000,00	157.871.000,00	-384.301.000,00	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	122.042.700,00	9.000.000,00	-113.042.700,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	17.936.103.628,00	13.136.934.600,00	-4.799.169.028,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	17.936.103.628,00	13.136.934.600,00	-4.799.169.028,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.530.582.100,00	855.530.000,00	-675.052.100,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.156.064.100,00	729.190.000,00	-426.874.100,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000,00	23.760.000,00	-42.240.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000,00	154.800.000,00	-80.450.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	207.320.000,00	130.980.000,00	-76.340.000,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	191.700.000,00	189.450.000,00	-2.250.000,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	187.140.000,00	98.000.000,00	-89.140.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	268.654.100,00	132.200.000,00	-136.454.100,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	374.518.000,00	126.340.000,00	-248.178.000,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	225.008.000,00	18.350.000,00	-206.658.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	149.510.000,00	107.990.000,00	-41.520.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	974.914.200,00	300.754.200,00	-674.160.000,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	215.498.000,00	68.812.000,00	-146.686.000,00	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	215.498.000,00	68.812.000,00	-146.686.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	759.416.200,00	231.942.200,00	-527.474.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	206.379.200,00	46.886.000,00	-159.493.200,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	553.037.000,00	185.056.200,00	-367.980.800,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.430.607.328,00	11.980.650.400,00	-3.449.956.928,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.122.351.728,00	9.706.740.000,00	-415.611.728,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.122.351.728,00	9.706.740.000,00	-415.611.728,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.108.792.800,00	436.000.000,00	-672.792.800,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.108.792.800,00	436.000.000,00	-672.792.800,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.883.931.500,00	1.008.520.600,00	-875.410.900,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.005.800,00	15.989.000,00	-16.800,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	367.782.400,00	365.995.900,00	-1.786.500,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	234.971.000,00	64.409.900,00	-170.561.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	257.776.000,00	104.729.500,00	-153.046.500,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.396.300,00	57.396.300,00	0,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000,00	400.000.000,00	-550.000.000,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.374.892.600,00	69.617.600,00	-1.305.275.000,00	
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.770.600,00	69.617.600,00	-32.153.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.238.700,00	539.302.200,00	3.063.500,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147.213.100,00	147.180.800,00	-32.300,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.880.000,00	132.680.000,00	-5.200.000,00	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.449.600,00	243.745.400,00	8.295.800,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.400.000,00	220.470.000,00	-183.930.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.230.000,00	119.010.000,00	-140.220.000,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.520.000,00	57.810.000,00	-43.710.000,00	
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	27.628.237.691,00	20.727.275.784,00	-6.900.961.907,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar	4.108.484.648,00	3.029.532.486,00	-1.078.952.162,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.779.800,00	49.779.800,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.994.600,00	39.994.600,00	0,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.994.600,00	39.994.600,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.785.200,00	9.785.200,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.785.200,00	9.785.200,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	420.990.600,00	52.322.400,00	-368.668.200,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	420.990.600,00	52.322.400,00	-368.668.200,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	420.990.600,00	52.322.400,00	-368.668.200,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.258.100,00	19.758.100,00	-3.500.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.258.100,00	19.758.100,00	-3.500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.958.100,00	5.458.100,00	-3.500.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.840.400,00	16.340.400,00	-13.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.840.400,00	16.340.400,00	-13.500.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.840.400,00	16.340.400,00	-13.500.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	103.160.400,00	9.999.200,00	-93.161.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	103.160.400,00	9.999.200,00	-93.161.200,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.999.200,00	9.999.200,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.481.455.348,00	2.881.332.586,00	-600.122.762,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.707.289.348,00	2.266.189.186,00	-441.100.162,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.707.289.348,00	2.266.189.186,00	-441.100.162,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.685.000,00	152.283.400,00	-181.401.600,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.934.800,00	10.729.000,00	-17.205.800,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.692.300,00	30.291.100,00	-10.401.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.998.600,00	20.710.700,00	-19.287.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.059.300,00	26.452.600,00	-43.606.700,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	6.600.000,00	-8.400.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	50.000.000,00	-75.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.880.000,00	327.860.000,00	227.980.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.880.000,00	97.680.000,00	-1.200.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	229.680.000,00	229.680.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.254.000,00	135.000.000,00	-163.254.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.680.000,00	35.330.000,00	-3.350.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.540.000,00	72.260.000,00	-36.280.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.850.000,00	27.410.000,00	-7.440.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung	4.416.679.600,00	3.248.175.400,00	-1.168.504.200,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	638.642.700,00	59.317.400,00	-579.325.300,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	623.650.000,00	59.317.400,00	-564.332.600,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	623.650.000,00	59.317.400,00	-564.332.600,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.993.300,00	2.250.000,00	-12.743.300,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.993.300,00	2.250.000,00	-12.743.300,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.993.300,00	2.250.000,00	-12.743.300,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.976.700,00	20.733.400,00	-29.243.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.976.700,00	20.733.400,00	-29.243.300,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	49.976.700,00	20.733.400,00	-29.243.300,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.653.066.900,00	3.140.874.600,00	-512.192.300,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.754.222.000,00	2.431.642.000,00	-322.580.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.754.222.000,00	2.431.642.000,00	-322.580.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.126.000,00	39.042.000,00	-18.084.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.126.000,00	9.042.000,00	-18.084.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.907.900,00	139.023.400,00	-100.884.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.996.600,00	29.116.200,00	-880.400,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.998.500,00	49.994.400,00	-4.100,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.912.800,00	9.912.800,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.389.400,00	8.835.600,00	-87.553.800,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.389.400,00	8.835.600,00	-87.553.800,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.691.600,00	387.391.600,00	193.700.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.870.000,00	74.870.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.821.600,00	312.521.600,00	193.700.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.730.000,00	134.940.000,00	-176.790.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.520.000,00	73.910.000,00	-72.610.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.210.000,00	6.630.000,00	-17.580.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.000.000,00	54.400.000,00	-86.600.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit	4.150.843.600,00	3.286.970.190,00	-863.873.410,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.292.100,00	8.569.500,00	-13.722.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.122.600,00	8.100.000,00	-11.022.600,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.122.600,00	8.100.000,00	-11.022.600,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.169.500,00	469.500,00	-2.700.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.169.500,00	469.500,00	-2.700.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.831.500,00	29.603.000,00	-269.228.500,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	298.831.500,00	29.603.000,00	-269.228.500,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	298.831.500,00	29.603.000,00	-269.228.500,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.771.400,00	1.146.800,00	-15.624.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.771.400,00	1.146.800,00	-15.624.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.998.000,00	1.146.800,00	-7.851.200,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.405.700,00	3.375.000,00	-4.030.700,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.405.700,00	3.375.000,00	-4.030.700,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.405.700,00	3.375.000,00	-4.030.700,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	67.910.700,00	6.075.000,00	-61.835.700,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.910.700,00	6.075.000,00	-61.835.700,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27.000.000,00	6.075.000,00	-20.925.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.737.632.200,00	3.238.200.890,00	-499.431.310,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.123.012.000,00	2.610.286.290,00	-512.725.710,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.123.012.000,00	2.610.286.290,00	-512.725.710,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.988.000,00	61.473.600,00	-67.514.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.212.500,00	8.518.700,00	-10.693.800,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.953.500,00	11.203.500,00	-4.750.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.854.000,00	16.396.400,00	-17.457.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.968.000,00	5.355.000,00	-4.613.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.044.100,00	451.701.000,00	198.656.900,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.469.800,00	17.001.000,00	-6.468.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000,00	52.800.000,00	-14.400.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.374.300,00	381.900.000,00	219.525.700,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.430.000,00	114.740.000,00	-101.690.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.630.000,00	108.040.000,00	-56.590.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.600.000,00	6.700.000,00	-16.900.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak	3.833.404.923,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.780.000,00	7.310.000,00	-12.470.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.780.000,00	7.310.000,00	-6.470.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.780.000,00	7.310.000,00	-6.470.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	360.018.900,00	72.150.000,00	-287.868.900,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	360.018.900,00	72.150.000,00	-287.868.900,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	360.018.900,00	72.150.000,00	-287.868.900,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.500.000,00	1.000.000,00	-9.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.500.000,00	1.000.000,00	-9.500.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.500.000,00	1.000.000,00	-9.500.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.190.000,00	1.000.000,00	-11.190.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.190.000,00	1.000.000,00	-11.190.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.190.000,00	1.000.000,00	-11.190.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.785.300,00	5.500.000,00	-33.285.300,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.785.300,00	5.500.000,00	-33.285.300,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.285.300,00	4.500.000,00	-20.785.300,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.500.000,00	1.000.000,00	-12.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.392.130.723,00	2.750.396.922,00	-641.733.801,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.443.362.723,00	2.153.079.622,00	-290.283.101,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.362.723,00	2.153.079.622,00	-290.283.101,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.731.800,00	106.454.600,00	-210.277.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.846.300,00	3.940.000,00	-20.906.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.836.600,00	25.440.600,00	-34.396.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.635.700,00	7.313.200,00	-7.322.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.413.200,00	39.997.300,00	-77.415.900,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	4.763.500,00	-20.236.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.774.200,00	369.502.700,00	51.728.500,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.400,00	1.499.500,00	-3.495.900,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.778.800,00	350.003.200,00	55.224.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.888.000,00	113.860.000,00	-140.028.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.660.000,00	109.410.000,00	-25.250.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.040.000,00	4.450.000,00	-20.590.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	3.633.551.776,00	2.783.406.086,00	-850.145.690,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.999.400,00	5.400.000,00	-394.599.400,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	399.999.400,00	5.400.000,00	-394.599.400,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	399.999.400,00	5.400.000,00	-394.599.400,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.079.701.476,00	2.778.006.086,00	-301.695.390,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.222.749.476,00	2.064.359.986,00	-158.389.490,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.222.749.476,00	2.064.359.986,00	-158.389.490,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.354.700,00	86.123.300,00	-61.231.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.011.600,00	9.946.500,00	-7.065.100,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.990.000,00	19.400.400,00	-589.600,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.349.600,00	23.375.100,00	-5.974.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.128.500,00	21.476.300,00	-14.652.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.875.000,00	11.925.000,00	-7.950.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.378.000,00	512.672.800,00	118.294.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000,00	24.900.000,00	-15.300.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.600.400,00	487.772.800,00	134.172.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.297.000,00	114.850.000,00	-117.447.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.690.000,00	99.990.000,00	-34.700.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggang	3.633.168.400,00	2.588.288.600,00	-1.044.879.800,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.117.200,00	21.763.700,00	-4.353.500,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.617.200,00	17.267.200,00	-1.350.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.617.200,00	17.267.200,00	-1.350.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.500.000,00	4.496.500,00	-3.003.500,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.500.000,00	4.496.500,00	-3.003.500,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	433.219.900,00	163.771.000,00	-269.448.900,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	433.219.900,00	163.771.000,00	-269.448.900,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	433.219.900,00	163.771.000,00	-269.448.900,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.322.600,00	7.241.300,00	-21.081.300,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.322.600,00	7.241.300,00	-21.081.300,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.796.300,00	7.241.300,00	-9.555.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.861.300,00	6.186.300,00	-43.675.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.861.300,00	6.186.300,00	-43.675.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	49.861.300,00	6.186.300,00	-43.675.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.990.300,00	4.994.600,00	-63.995.700,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.990.300,00	4.994.600,00	-63.995.700,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.993.500,00	4.994.600,00	-6.998.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.657.100,00	2.384.331.700,00	-642.325.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.168.968.000,00	1.900.320.000,00	-268.648.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.168.968.000,00	1.900.320.000,00	-268.648.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	7.500.000,00	-15.000.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000,00	7.500.000,00	-15.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.448.300,00	67.098.900,00	-246.349.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.993.200,00	4.107.000,00	-10.886.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	10.188.000,00	-39.812.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.457.800,00	10.000.000,00	-25.457.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.997.300,00	16.303.900,00	-33.693.400,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	6.500.000,00	-6.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	20.000.000,00	-130.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.042.100,00	327.062.800,00	107.020.700,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.592.500,00	36.000.000,00	-3.592.500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.449.600,00	289.062.800,00	113.613.200,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.592.000,00	82.350.000,00	-150.242.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.220.000,00	36.080.000,00	-18.140.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.910.000,00	38.880.000,00	-40.030.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.580.000,00	7.390.000,00	-7.190.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang	3.852.104.744,00	2.953.546.100,00	-898.558.644,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.751.300,00	9.000.000,00	-10.751.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.008.800,00	9.000.000,00	-8.008.800,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.008.800,00	9.000.000,00	-8.008.800,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	373.601.700,00	43.000.000,00	-330.601.700,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	336.454.800,00	43.000.000,00	-293.454.800,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	336.454.800,00	43.000.000,00	-293.454.800,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.486.700,00	2.141.100,00	-21.345.600,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.486.700,00	2.141.100,00	-21.345.600,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.992.000,00	2.141.100,00	-9.850.900,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.663.200,00	2.663.200,00	-13.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.663.200,00	2.663.200,00	-13.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.663.200,00	2.663.200,00	-13.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.141.000,00	5.682.800,00	-28.458.200,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.141.000,00	5.682.800,00	-28.458.200,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.039.400,00	2.458.800,00	-17.580.600,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.531.200,00	3.224.000,00	-3.307.200,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.385.460.844,00	2.891.059.000,00	-494.401.844,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.637.234.544,00	2.284.247.600,00	-352.986.944,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.637.234.544,00	2.284.247.600,00	-352.986.944,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.612.100,00	102.054.000,00	-109.558.100,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.498.000,00	29.696.700,00	-2.801.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.409.200,00	35.409.200,00	0,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.715.300,00	26.948.100,00	-6.767.200,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	10.000.000,00	-65.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.958.600,00	416.352.400,00	127.393.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	36.000.000,00	-12.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.957.200,00	380.352.400,00	144.395.200,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.606.000,00	88.405.000,00	-96.201.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.010.000,00	76.530.000,00	-51.480.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.971.000,00	1.155.000,00	-18.816.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.620.000,00	10.720.000,00	-17.900.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.936.800.820,00	7.835.119.683,00	-5.101.681.137,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.936.800.820,00	7.835.119.683,00	-5.101.681.137,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.917.157.300,00	985.145.300,00	-932.012.000,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.917.157.300,00	985.145.300,00	-932.012.000,00	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.330.576.600,00	943.750.100,00	-386.826.500,00	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.395.200,00	41.395.200,00	0,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.905.051.600,00	1.366.011.900,00	-539.039.700,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.905.051.600,00	1.366.011.900,00	-539.039.700,00	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.168.915.000,00	1.154.915.000,00	-14.000.000,00	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000,00	29.500.000,00	-220.529.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.815.400,00	28.683.400,00	-87.132.000,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	307.884.200,00	152.502.000,00	-155.382.200,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000,00	411.500,00	-61.996.500,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	486.708.700,00	166.065.500,00	-320.643.200,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	486.708.700,00	166.065.500,00	-320.643.200,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	66.387.200,00	8.000.000,00	-58.387.200,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	238.775.000,00	119.650.000,00	-119.125.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	181.546.500,00	38.415.500,00	-143.131.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.048.227.400,00	130.895.400,00	-917.332.000,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.048.227.400,00	130.895.400,00	-917.332.000,00	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	110.945.200,00	2.250.000,00	-108.695.200,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	362.841.800,00	52.745.400,00	-310.096.400,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.900.000,00	75.900.000,00	-75.000.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.523.936.503,00	1.731.284.503,00	-792.652.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.523.936.503,00	1.731.284.503,00	-792.652.000,00	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	994.435.203,00	1.078.848.003,00	84.412.800,00	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	249.238.200,00	128.009.500,00	-121.228.700,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	306.270.900,00	113.375.500,00	-192.895.400,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	199.986.400,00	99.778.000,00	-100.208.400,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	311.273.500,00	-338.726.500,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.055.719.317,00	3.455.717.080,00	-1.600.002.237,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.394.900,00	1.147.200,00	-65.247.700,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.947.800,00	382.400,00	-24.565.400,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.609.100,00	382.400,00	-24.226.700,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.838.000,00	382.400,00	-16.455.600,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.950.390.022,00	2.629.491.580,00	-320.898.442,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.910.227.322,00	2.628.726.780,00	-281.500.542,00	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.801.100,00	382.400,00	-24.418.700,00	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.361.600,00	382.400,00	-14.979.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.800.000,00	11.000.000,00	-117.800.000,00	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.500.000,00	5.500.000,00	-51.000.000,00	
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.500.000,00	5.500.000,00	-43.000.000,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.683.900,00	321.327.700,00	-364.356.200,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.621.000,00	4.986.200,00	-21.634.800,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.571.300,00	26.515.800,00	-33.055.500,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.626.700,00	4.039.500,00	-6.587.200,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.161.700,00	20.639.000,00	-40.522.700,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.703.200,00	15.147.200,00	-12.556.000,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.063.900,00	334.840.600,00	70.776.700,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.387.400,00	79.709.900,00	-4.677.500,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.076.500,00	196.930.700,00	79.854.200,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.233.395,00	157.910.000,00	-98.323.395,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.510.000,00	43.750.000,00	-3.760.000,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.184.000,00	104.860.000,00	-64.324.000,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.790.000,00	9.300.000,00	-8.490.000,00	

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran. Optimalisasi pembiayaan daerah diarahkan melalui:

- a. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan strategi dan prioritas :
 - Efisiensi dan Efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah;
 - Optimalisasi penjualan kekayaan daerah berbasis analisa ekonomi biaya pemeliharaan;
- b. Minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah, dengan strategi prioritas selektif dan berdasarkan pendekatan analisa ekonomi di dalam penyertaan modal.

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
Pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 53.412.484.057 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (98.912.670.377) atau (64,95%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp. 152.325.154.434,
- b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Pada perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 136.899.812 mengalami penurunan sebesar Rp. (363.100.188) atau (72,62%) dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp.500.000.000.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 terdiri dari penerimaan dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan kembali pinjaman, seperti terlihat pada tabel. 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.825.154.434	53.549.383.869	(99.275.770.565)	64,98%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	152.325.154.434	53.412.484.057	(98.912.670.377)	64,96%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	136.899.812	(363.100.188)	72,62%



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	152.825.154.434	53.549.383.869	(99.275.770.565)	64,98%
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0	0,00%
	Pembiayaan Netto	152.825.154.434	53.549.383.869	(99.275.770.565)	64,98%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun sebagai tindak lanjut dari perkembangan situasi, kondisi, dan kebijakan strategis yang terjadi setelah penetapan PPAS Tahun Anggaran 2025. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, capaian pembangunan daerah, serta memperhatikan dinamika yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Secara umum, perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar lebih realistis, efektif, dan efisien sesuai dengan perkembangan aktual. Penyesuaian kebijakan pendapatan difokuskan untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, mempercepat pencapaian target RPJMD, serta mengakomodasi kebijakan strategis nasional dan instruksi pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan PPAS ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Akhirnya, dengan ditetapkannya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bupati Belitung Timur.

Demikian dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Terima Kasih.